



**PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 58 TAHUN 2018**

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN PATI
2017 – 2022**

**PEMERINTAH KABUPATEN PATI
TAHUN 2018**

SALINAN



BUPATI PATI

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 58 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PATI TAHUN 2017-2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 dan Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pati Tahun 2017-2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
20. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
21. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015–2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);

24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Pati Nomor 56);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pati Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 57);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 99);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 114);
31. Peraturan Bupati Pati Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 50);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN PATI TAHUN 2017-2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Bupati adalah Bupati Pati.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
8. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
9. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
10. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
11. Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah yang selanjutnya disebut Forkopimda adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.
12. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
13. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati.
14. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pati.
15. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Daerah antara lain unsur DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, TNI, POLRI, Kejaksaan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat provinsi dan kabupaten/ kota/ desa, dunia usaha/investor, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pemerintahan desa, dan kelurahan serta keterwakilan perempuan (seperti PKK, Organisasi Kewanitaan) dan kelompok masyarakat rentan termarginalkan.

16. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
17. Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
18. Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.
19. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.
21. Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pati yang selanjutnya disebut Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah dokumen perencanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk periode 5 (lima) tahun.
22. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

23. Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pati yang selanjutnya disebut Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah dokumen perencanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk periode 1 (satu) tahun.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
25. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
26. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
27. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
28. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
29. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
30. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

31. Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.
32. Kerangka Pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan Daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam upaya mencapai visi dan misi Kepala Daerah serta target pembangunan nasional.
33. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.
34. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.
35. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
36. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
37. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
38. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.

39. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
40. Program pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.
41. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
42. Kinerja adalah capaian keluaran/ hasil/ dampak dari kegiatan/ program/ sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
43. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).
44. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
45. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
46. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.
47. Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan Daerah.

48. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi kedalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
49. Provinsi/Kabupaten/Kota lainnya adalah Daerah otonom yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan dan/atau yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan.
50. Hari adalah hari kerja.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 untuk memberikan arah dan pedoman bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang guna mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati yang telah dijabarkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.
- (2) Tujuan ditetapkannya Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 adalah memberikan pedoman bagi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan awal RKPD.

BAB III

RENCANA STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Pasal 3

Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan Pembangunan Daerah dalam rangka melaksanakan tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

- (2) Isi beserta uraian Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Pasal 5

- (1) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melakukan pengendalian dan evaluasi Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pati Tahun 2017-2022, meliputi :
- a. Perumusan kebijakan Renstra.
 - b. Pelaksanaan Renstra.
 - c. Evaluasi terhadap hasil Renstra.

- (2) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi kepada Kepala Bappeda untuk diverifikasi.
- (3) Hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Bappeda.

BAB V

PERUBAHAN RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Pasal 6

Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 dapat dilakukan apabila terjadi perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017-2022.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2018 harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 19 Maret 2018
BUPATI PATI,

Ttd.

HARYANTO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 19 Maret 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

Ttd.

SUHARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2018 NOMOR 58

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



SITI SUBIATI, SH, MM

Pembina

NIP. 19720424 199703 2 010

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah rencana yang berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang ada atau mungkin timbul, mengandung visi, misi, nilai-nilai, faktor-faktor penentu keberhasilan dan tujuan pembangunan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai.

Fungsi Rencana Strategis Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah adalah sebagai pedoman dan arah dalam penyelenggaraan urusan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang serta pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat kabupaten Pati.

Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) untuk jenjang perencanaan jangka panjang (25 tahun), Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka menengah (5 tahun) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka pendek atau tahunan (1 tahun). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagaimana tertuang dalam UU no. 23 tahun 2014 tentang Pemda Pasal 272 perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD, Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana di maksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Wajib dan / atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra) merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan Perangkat Daerah Khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan masa pimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Renstra sebagai suatu dokumen rencana yang penting sudah sepatutnya pemerintah daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan masyarakat memberikan perhatian penting pada kualitas proses penyusunan dokumen tersebut, dan tentunya diikuti dengan pemantauan, evaluasi dan review berkala terhadap implementasinya.

Proses penyusunan dokumen renstra sangat terkait dengan visi dan misi Bupati Pati, sekaligus berfungsi sebagai dokumen perencanaan yang mengakomodasi berbagai aspirasi masyarakat yang ada dalam lingkup wilayah Kabupaten Pati, serta menjawab tiga pertanyaan dasar yaitu 1) kemana pelayanan Perangkat Daerah akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang; 2) bagaimana mencapainya; 3) langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan. Oleh karena itu maka kualitas penyusunan Renstra akan sangat ditentukan oleh kemampuan untuk menerjemahkan, mengoperasionalkan, dan mengimplementasikan Visi, Misi dan Agenda Kepala Daerah, tujuan, strategi, kebijakan, dan capaian program RPJMD ke dalam penyusunan Renstra sesuai tugas dan fungsi. Kinerja penyelenggaraan urusan akan sangat mempengaruhi kinerja pemerintahan daerah dan Kepala Daerah selama masa kepemimpinannya.

Dalam konteks ini, adalah sangat penting bagi Renstra untuk mengklarifikasikan secara eksplisit visi dan misi Kepala Daerah terpilih dan dokumen RPJMD, kemudian menerjemahkan secara strategis, sistematis, dan terpadu ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, dan program prioritas serta tolak ukur pencapaiannya. Untuk mendapatkan dukungan yang optimal bagi implementasinya, proses penyusunan dokumen Renstra perlu membangun komitmen dan kesepakatan dari semua stakeholder untuk mencapai tujuan Renstra

melalui proses yang transparan, demokratis, dan akuntabel dengan memadukan pendekatan teknokratis, partisipatif, dan politis.

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pati, maka setiap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati memiliki kewajiban untuk menyusun dokumen perencanaan yang sifatnya merupakan implementasi program. Dokumen perencanaan tersebut adalah Rencana Strategis dan Rencana Kerja. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pati sebagai salah satu lembaga teknis daerah tidak luput dari kewajiban untuk menyusun Renstra dan Renja dimaksud yang didasarkan pada tugas pokok dan fungsinya.

Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pati selanjutnya dijabarkan ke dalam program dan kegiatan tahunan dengan menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) yang akan diimplementasikan setiap tahun sesuai dengan struktur organisasi tata kerja serta tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pati, yang dilengkapi dengan kerangka anggaran. Dengan adanya perencanaan yang sinkron dan terkoordinasi dengan dokumen perencanaan lainnya, maka pelaksanaan program kegiatan Perangkat Daerah akan berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan penyusunan dokumen Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pati berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah; Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas RI No 2 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Tahun 2015-2019;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010-2030;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pati Tahun 2005 – 2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 99);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017-2022;

1.3. Maksud dan Tujuan

Sebagai suatu dokumen perencanaan, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pati Tahun 2012-2017 dimaksudkan untuk memberikan arah sekaligus menjadi pedoman dalam pencapaian visi, misi dan program, serta sebagai tolok ukur kinerja bagi seluruh jajaran staf dalam mewujudkan tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pati secara berkesinambungan. Rencana Strategis ini juga disusun dalam rangka implementasi RPJMD Kabupaten Pati sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pati.

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pati adalah :

1. Untuk menetapkan kebijakan dan program strategis dalam merencanakan pembangunan daerah yang didasarkan melalui evaluasi pembangunan lima tahun yang telah berjalan, menelaah situasi saat ini dan membuat peramalan serta proyeksi pembangunan, dengan harapan dapat dipilih beberapa sasaran yang tepat sesuai kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk mencapai tujuan yang ditetapkan yang selanjutnya dapat dituangkan dalam Rencana Kerja sebagai dokumen operasional tahunan.
2. Memberikan landasan kebijakan pembangunan selama lima tahunan dalam kerangka pencapaian visi, misi dan sebagai tolok ukur pertanggungjawaban Kepala Perangkat Daerah kepada Bupati.
3. Sebagai informasi kepada seluruh jajaran staf Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Perangkat Daerah berkaitan dengan dokumen perencanaan pembangunan selama lima tahun yang mengacu pada RPJP dan RPJMD.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 sebagai berikut :

1. BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang, landasan hukum penyusunan renstra, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

2. BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memaparkan gambaran pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pati terkait dengan tugas, fungsi dan struktur organisasi Perangkat Daerah, sumber daya yang dimiliki dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, kinerja pelayanan yang dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra periode sebelumnya, dan tantangan serta peluang pengembangan pelayanan periode Tahun 2017-2022.

3. BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat tentang identifikasi permasalahan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pati berdasarkan tugas dan fungsinya; telaahan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih; telaahan Renstra K/L dan Renstra DPU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah; telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis; dan penentuan isu-isu strategis.

4. BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menjelaskan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pati.

5. BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menjelaskan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang;

6. BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang merujuk pada setiap tujuan dan sasaran yang hendak dicapai.

7. BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini memuat indikator kinerja yang menunjukkan kinerja yang ingin dicapai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pati dalam kurun 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen mendukung tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2017-2022.

8. BAB VIII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi PD

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pati dan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pati, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pati merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Pertanahan. Organisasi ini dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Tugas

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pati mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta pertanahan dan tugas pembantu yang di berikan kepada daerah.

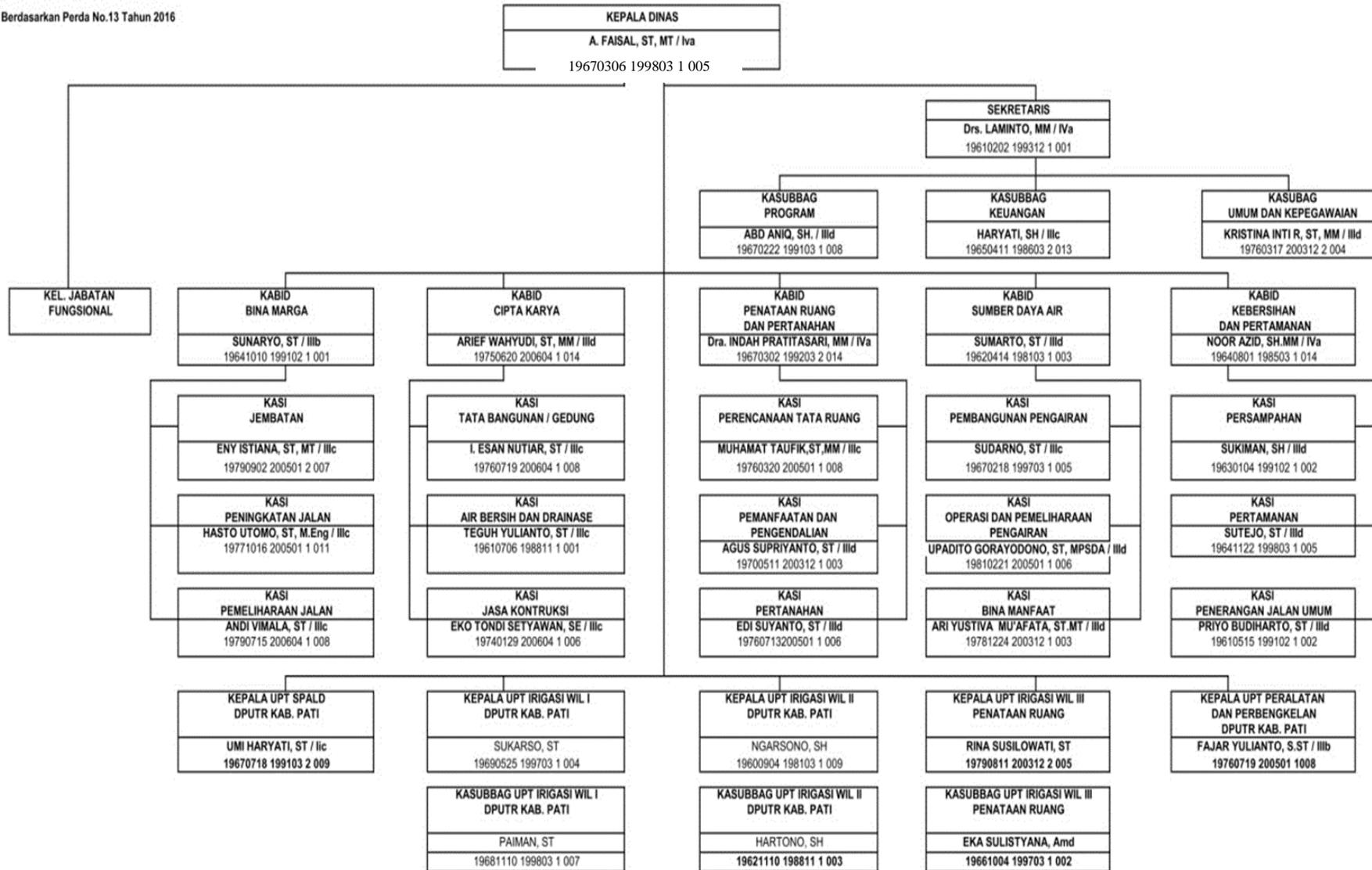
Fungsi

Fungsi DPUTR Kab. Pati :

1. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta pertanahan;
2. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta pertanahan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta pertanahan;
4. Pelaksanaan administrasi urusan pemerintahan daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta pertanahan;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Pp No. 18 Tahun 2016

Berdasarkan Perda No.13 Tahun 2016



Struktur Organisasi

Peraturan Bupati Pati Nomor 51 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pati, masing – masing struktur mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

a) Kepala Dinas

Kepala Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas pokok membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta pertanahan dan tugas pembantuan yang di berikan kepada daerah.

b) Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris. Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas pokok menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan program, keuangan, umum dan kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat dan organisasi serta pengoordinasian perencanaan dan pelaporan bidang di lingkungan Dinas.

Sekretariat dalam menjalankan tugasnya mempunyai fungsi :

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang program, keuangan, umum dan kepegawaian;
2. Pengelolaan dan pelayanan program, keuangan dan umum dan kepegawaian serta hukum, hubungan masyarakat dan organisasi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
3. Pengoordinasian pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
4. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c) Bidang Bina Marga

Bidang Bina Marga mempunyai tugas pokok menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan pada seksi Jembatan, Seksi Peningkatan Jalan dan Seksi Pemeliharaan Jalan.

Bidang Bina Marga dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan jembatan, peningkatan jalan, dan kegiatan pemeliharaan jalan;
2. Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan jembatan, peningkatan jalan, dan kegiatan pemeliharaan jalan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
3. Pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan jembatan, peningkatan jalan, dan kegiatan pemeliharaan jalan;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d) Bidang Cipta karya

Bidang Cipta Karya mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan Tata Bangunan/ Gedung, Air Bersih dan Drainase, serta kegiatan Jasa Konstruksi.

Bidang Cipta Karya dalam menjalankan tugas mempunyai fungsi :

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan Tata Bangunan/Gedung, Air Bersih dan Drainase, serta kegiatan Jasa Konstruksi.
2. Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan Tata Bangunan/ Gedung, Air bersih dan Drainase, serta kegiatan Jasa konstruksi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
3. Pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Tata Bangunan/ Gedung, Air bersih dan Drainase, serta kegiatan Jasa Konstruksi;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

e) Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan.

Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan perencanaan tata ruang, pemamfaatan dan pengendalian, serta kegiatan pertanahan.

Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan dalam menjalankan tugas mempunyai fungsi :

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan perencanaan tata ruang, pemanfaatan dan pengendalian, serta kegiatan pertanahan;
2. Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan perencanaan tata ruang, pemanfaatan dan pengendalian, serta kegiatan pertanahan, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
3. Pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan perencanaan tata ruang, pemanfaatan dan pengendalian serta kegiatan pertanahan;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

f) Bidang Sumber Daya Air

Bidang Sumberdaya Air mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan umum dan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan seksi pembangunan pengairan, seksi operasi dan pemeliharaan pengairan, seksi bina manfaat.

Bidang Sumberdaya Air mempunyai dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan pengairan, operasi dan pemeliharaan pengairan, serta kegiatan bina manfaat;
2. Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan pembangunan pengairan, operasi dan pemeliharaan pengairan, serta kegiatan bina manfaat untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
3. Pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pembangunan pengairan, operasi dan pemeliharaan pengairan, serta kegiatan bina manfaat;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

g) Bidang Kebersihan dan Pertamanan.

Bidang Kebersihan dan pertamanan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan seksi persampahan dan air limbah, pertamanan, dan penerangan jalan umum.

Bidang kebersihan dan pertamanan dalam menjalankan tugas mempunyai fungsi :

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan persampahan dan air limbah, pertamanan, dan kegiatan penerangan jalan umum;
2. Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan persampahan dan air limbah, pertamanan, dan kegiatan penerangan jalan umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
3. Pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan persampahan dan air limbah, pertamanan, dan kegiatan penerangan jalan umum;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

h) Kelompok Jabatan Fungsional;

i) Unit Pelaksana Teknis Daerah.

2.2 Sumber Daya PD

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Pati sebagai salah satu perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kab. Pati yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta pertanahan dan tugas pembantuan yang di berikan kepada daerah. Guna menjalankan tugas dan fungsinya tersebut perlu di dukung sumberdaya aparatur yang mempunyai kompetensi secara teknis di bidang bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta pertanahan. Berjalannya penyelenggaraan yang baik mengedepankan prinsip – prinsip partisipatif, transparansi, responsif, cepat, tepat dan cermat. Berkaitan dengan hal tersebut peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya sumber daya aparatur harus menjadi salah satu prioritas penting dan strategis saat ini dan di masa mendatang. Sumber daya aparatur menempati posisi strategis yang bukan hanya mewarnai melainkan juga menentukan kemana suatu daerah akan

dibawa. Oleh karena itu pemerintahan di masa mendatang adalah pemerintahan yang mampu menerjemahkan kebijakan publik kedalam langkah-langkah operasional yang kreatif, dan inovatif dengan orientasi pada kepentingan masyarakat.

Terkait dengan hal tersebut di atas dan untuk menjalankan tugas dan fungsinya, berdasarkan data kepegawaian hingga Januari 2017 adalah sebagai berikut:

- 1). Jumlah Pegawai : 408 orang

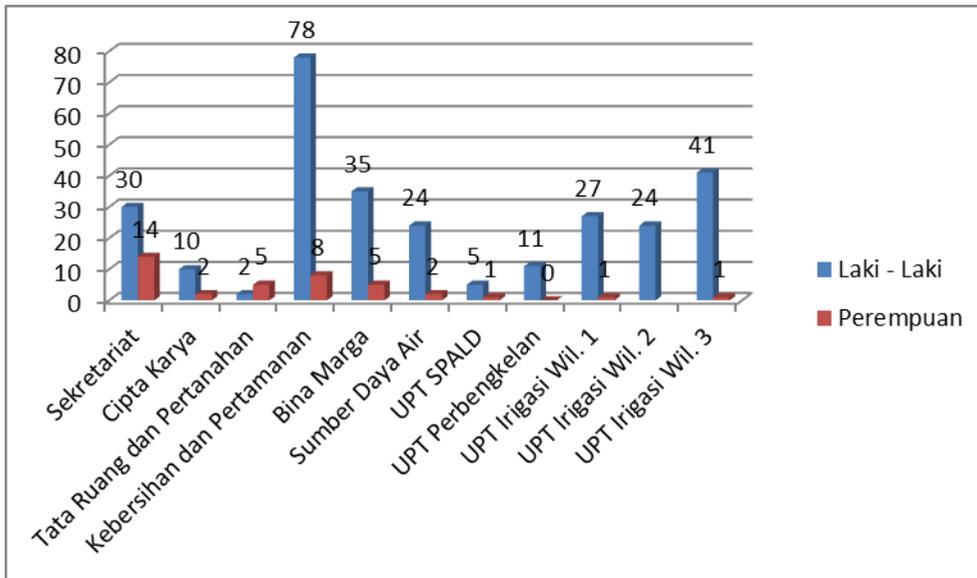
| No. | Status Pegawai | Laki-laki | Perempuan |
|-----|----------------------|------------|-----------|
| 1 | Pegawai Negeri Sipil | 376 | 32 |
| | Jumlah | 376 | 32 |

Tabel 2.2 Jumlah PNS DPUTR Kab.Pati

- 2). Jumlah pegawai PNS berdasarkan unit bidang :

| No | Unit Bidang | Jumlah Pegawai | |
|----|------------------------------|----------------|-----------|
| | | Laki - Laki | Perempuan |
| 1 | Sekretariat | 30 | 14 |
| 2 | Cipta Karya | 10 | 2 |
| 3 | Tata Ruang dan Pertanahan | 2 | 5 |
| 4 | Kebersihan dan Pertamanan | 78 | 8 |
| 5 | Bina Marga | 35 | 5 |
| 6 | Sumber Daya Air | 24 | 2 |
| 7 | UPT SPALD | 5 | 1 |
| 8 | UPT Perbengkelan | 11 | - |
| 9 | UPT Irigasi Wil. 1 | 27 | 1 |
| 10 | UPT Irigasi Wil. 2 | 24 | |
| 11 | UPT Irigasi Wil. 3 | 41 | 1 |

Tabel 2.1 Jumlah PNS per Unit Bidang

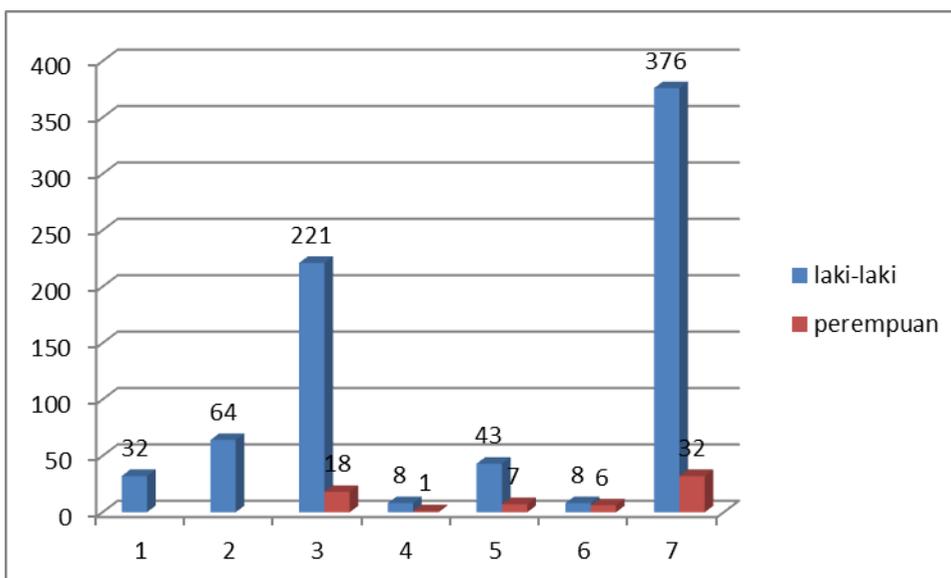


Gambar 2.1 Jumlah PNS berdasarkan Unit Bidang

3). Kualifikasi pegawai berdasarkan status pendidikan:

| No. | Tingkat Pendidikan PNS | Jumlah | |
|-----|------------------------|------------|-----------|
| | | Laki-Laki | Perempuan |
| 1 | Sekolah Dasar (SD) | 32 | |
| 2 | SMP | 64 | |
| 3 | SMA | 221 | 18 |
| 4 | Sarjana Muda / D III | 8 | 1 |
| 5 | Sarjana (S1) / D IV | 43 | 7 |
| 6 | Pasca Sarjana (S2) | 8 | 6 |
| | Jumlah | 376 | 32 |

Tabel 2.4. Kualifikasi Pegawai berdasarkan status pendidikan



Gambar 2.2 Profil. Aparatur DPUTR Kab. Pati Berdasarkan Status pendidikan.

4). Kualifikasi pegawai berdasarkan pangkat dan golongan:

| No. | Pangkat/ Golongan | Jumlah |
|-----|----------------------------------|------------|
| 1 | Golongan I | |
| | a. JuruMuda (I / a) | 1 |
| | a. JuruMuda TK. I (I/ b) | 6 |
| | b. Juru (I/ c) | 17 |
| 2 | d. Juru TK. I (I / d) | 14 |
| | Golongan II | |
| | a. PengaturMuda (II / a) | 63 |
| | b. PengaturMuda TK. I (II / b) | 111 |
| 3 | c. Pengatur (II / c) | 74 |
| | d. Pengatur TK. I (II / d) | 20 |
| | Golongan III | |
| | a. PenataMuda (III / a) | 16 |
| 4 | b. PenataMuda TK. I (III / b) | 36 |
| | c. Penata (III / c) | 17 |
| | d. Penata TK. I (III / d) | 29 |
| | Golongan IV | |
| 4 | a. Pembina (IV / a) | 3 |
| | b. Pembina TK I (IV/b) | 1 |
| | c. Pembina UtamaMuda (IV/c) | |
| | Jumlah | 408 |

Tabel 2.5 Jumlah PNS Berdasarkan Pangkat dan Golongan

2). Jumlah pejabat struktural dan Fungsional:

| No. | Pangkat/ Golongan | Jumlah | |
|-----|-------------------|-----------|-----------|
| | | Laki-laki | Perempuan |
| 1 | Eselon II | | |
| | a. Eselon II A | - | |
| 2 | b. Eselon II B | - | |
| | Eselon III | | |
| 3 | a. Eselon III A | 1 | |
| | b. Eselon III B | 4 | 1 |
| 3 | Eselon IV | | |
| | a. Eselon IV A | 19 | 4 |
| | b. Eselon IV B | 4 | 1 |
| | Jumlah | 27 | 6 |

Tabel 2.6 Data Pejabat Struktural DPUTR Kab. Pati

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Terakait dengan kinerja DPUTR Kab. Pati Selama lima (5) Tahun sebelumnya, Tabel berikut di bawah ini menunjukkan pencapaian layanan pada DPUTR Kab. Pati dalam Kurun Waktu 2012 – 2017 berdasarkan Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP).

Tabel 2.7 Pencapaian Kinerja Pelayanan DPUTR Kabupaten Pati

| No. | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator or Lainnya | Target Renstra PD Tahun | | | | | | Realisasi Capaian Tahun ke- | | | | | | Rasio Capaian pada Tahun ke- (%) | | | | | |
|-----|--|-------------|------------|-----------------------------|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------------------|-------|-------|--------|-----------|-----------|----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) |
| 1. | Persentase panjang jalan dalam kondisi baik | | % | | 31,83 | 30,45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 40 | 44 | 50 | 54,79 | 58 | 62 | 125,67 | 144,50 | 109,58 | 91,32 | 82,86 | 88,57 |
| 2. | Persentase rumah tinggal bersantasi | | % | | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 57,35 | 60,97 | 62,1 | 62,36 | 71 | 93,16 | 104,3 | 101,62 | 95,54 | 89,08 | 94,66 | 116,45 |
| 3. | Panjang jalan di lalui Roda 4 | | Km | | 812,716 | 812,716 | 812,716 | 812,716 | 812,716 | 812,716 | 747,3 | 747,3 | 781,2 | 825,33 | 1.465,977 | 1.465,977 | 91,95 | 91,95 | 96,12 | 101,55 | 180,34 | 180,34 |
| 4. | Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan air tidak tetrsumbat | | | | 60 | 63 | 67 | 70 | 72 | 78 | 40 | 42,58 | 43,04 | 54 | 58 | 75 | 66,67 | 67,59 | 64,24 | 70,14 | 80,55 | 96,15 |
| 5. | Luas irigasi dalam kondisi baik | | | % | 68 | 73 | 75 | 78 | 82 | 85 | 70 | 70 | 57 | 78 | 79 | 80 | 102,94 | 95,89 | 76 | 100 | 96,34 | 94,12 |

Tabel 2.8
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH DPUTR Kab. Pati
KABUPATEN PATI

| Uraian | Anggaran pada Tahun ke- | | | | | Realisasi Anggaran pada Tahun ke- | | | | | Rasio antara Realisasi dan Anggaran | | | | | Rata-rata | |
|--|-------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|---------------|
| | | | | | | | | | | | Tahun ke- | | | | | Pertumbuhan | |
| | 1 (2013) | 2 (2014) | 3 (2015) | 4 (2016) | 5 (2017) | 1 (2013) | 2 (2014) | 3 (2015) | 4 (2016) | 5 (2017) | 1 (2013) | 2 (2014) | 3 (2015) | 4 (2016) | 5 (2017) | Ang gara n | Real isasi |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| Pelayanan administrasi perkantoran | 2.704.384.300 | 3.134.928.000 | 2.085.550.300 | 2.469.524.480 | 2.854.394.825 | 2.526.644.118 | 2.969.761.908 | 1.863.391.029 | 2.214.929.042 | 2.618.456.432 | 93,43 | 94,73 | 89,35 | 89,69 | 91,73 | | |
| Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 31.577.885.900 | 23.039.967.000 | 29.382.401.000 | 19.991.457.600 | 18.115.609.250 | 29.908.210.143 | 21.817.766.200 | 28.095.093.606 | 19.108.827.835 | 17.283.673.621 | 94,71 | 94,70 | 95,62 | 95,58 | 95,41 | | |
| Peningkatan Disiplin Aparatur | 146.715.300 | 199.764.000 | 199.850.000 | 199.850.000 | 199.850.000 | 145.852.630 | 177.210.000 | 188.430.000 | 199.484.560 | 197.537.450 | 99,41 | 88,71 | 94,29 | 99,82 | 98,84 | | |
| Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 36.400.000 | 55.680.000 | 48.000.000 | 48.000.000 | 73.000.000 | 30.296.000 | 46.307.000 | 47.062.500 | 38.737.602 | 66.393.674 | 83,23 | 83,17 | 98,05 | 80,70 | 90,95 | | |
| Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 53.740.050 | 48.066.000 | 55.377.850 | 33.663.700 | 50.037.625 | 53.650.550 | 47.014.050 | 54.937.400 | 33.661.150 | 49.223.575 | 99,83 | 97,81 | 99,20 | 99,99 | 98,37 | | |
| Program peningkatan jalan dan jembatan | 23.498.670.000 | 54.221.601.000 | 57.264.880.000 | 145.476.194.000 | 133.627.986.550 | 23.190.397.425 | 53.777.285.700 | 55.278.553.600 | 144.967.104.944 | 133.054.253.390 | 98,69 | 99,18 | 96,53 | 99,65 | 99,57 | | |
| Pembangunan Jalan dan Jembatan | 2.876.376.000 | 9.378.000.000 | 18.870.000.000 | 7.399.679.000 | 9.041.616.600 | 2.867.057.925 | 9.323.591.150 | 15.312.806.730 | 1.893.653.625 | 10.243.712.270 | 99,68 | 99,42 | 81,15 | 25,59 | 113,30 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|-------|--------|-------|-------|-------|--|--|
| Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan | 114.999.900 | 150.000.000 | 64.480.000 | 34.418.100 | - | 114.368.900 | 53.855.300 | 64.267.425 | 34.160.000 | - | 99,45 | 35,90 | 99,67 | 99,25 | - | | |
| Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif | - | 200.000.000 | 260.000.000 | - | - | - | 199.799.700 | 259.499.600 | - | - | - | 99,90 | 99,81 | - | - | | |
| Program Pengembangan data /Informasi | - | 5.000.000 | 6.000.000 | 5.197.200 | 4.500.000 | - | 4.999.800 | 5.908.550 | 5.053.200 | 4.426.200 | - | 100,00 | 98,48 | 97,23 | 98,36 | | |
| Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan | 1.624.366.300 | 3.209.500.000 | 3.215.488.000 | 5.676.485.000 | 4.763.128.750 | 1.616.552.600 | 2.981.499.670 | 3.064.517.500 | 5.153.299.848 | 4.567.084.756 | 99,52 | 92,90 | 95,30 | 90,78 | 95,88 | | |
| Program Perbaikan sistem administrasi Kearsipan | - | - | - | 302.600.000 | 100.000.000 | - | - | - | 297.246.400 | 98.419.970 | - | - | - | 98,23 | 98,42 | | |
| Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong | 6.882.146.000 | 4.761.250.000 | 12.361.820.000 | 5.193.045.000 | 27.840.491.300 | 6.685.779.325 | 4.410.519.425 | 9.322.471.057 | 5.164.623.150 | 27.173.465.242 | 97,15 | 92,63 | 75,41 | 99,45 | 97,60 | | |
| Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup | - | - | - | 100.000.000 | - | - | - | - | 99.171.000 | - | | | | 99,17 | | | |
| Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ | - | 700.000.000 | - | - | - | - | 697.945.750 | - | - | - | | 99,71 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------|-------|-------|--------|-------|--|--|
| Program Pengembangan Komunikasi, informasi, Media massa | - | - | 350.000.000 | - | - | - | - | 333.350.000 | - | - | | | 95,24 | | | | |
| Program Pengembangan Perumahan | - | 1.086.000.000 | 469.148.000 | 806.524.500 | - | - | 1.065.456.740 | 430.970.540 | 801.803.725 | - | | 98,11 | 91,86 | 99,41 | | | |
| Program Perencanaan Tata Ruang | - | - | 30.000.000 | - | 671.232.000 | - | - | - | - | 513.316.905 | | | - | | 76,47 | | |
| Program Lingkungan Sehat Perumahan | 3.573.735.950 | 2.925.125.000 | 2.535.781.850 | 5.498.314.000 | 6.613.714.950 | 3.449.693.150 | 2.921.466.950 | 2.482.903.400 | 4.552.967.800 | 6.192.603.250 | 96,53 | 99,87 | 97,91 | 82,81 | 93,63 | | |
| Program Pemanfaatan Ruang | 105.000.000 | 2.899.000.000 | - | - | 360.000.000 | 104.721.825 | 2.626.417.250 | - | - | 180.290.736 | 99,74 | 90,60 | | | 50,08 | | |
| Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah | 1.200.000.000 | 90.000.000 | - | - | 117.850.000 | 630.597.000 | 89.636.800 | - | - | 96.852.575 | 52,55 | 99,60 | | | 82,18 | | |
| Program pemberdayaan Komunitas Perumahan | - | - | 115.000.000 | 115.000.000 | - | - | - | 114.953.000 | 114.872.000 | - | | | 99,96 | 99,89 | | | |
| Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah | - | 28.476.000 | 14.000.000 | 11.340.000 | 12.650.000 | - | 28.189.000 | 13.939.900 | 11.340.000 | 12.286.825 | | 98,99 | 99,57 | 100,00 | 97,13 | | |
| Program pembangunan turap/talud/bronjong | 11.501.480.000 | 26.117.105.000 | 31.943.949.000 | 18.485.108.000 | 33.252.175.100 | 11.447.578.775 | 25.858.088.291 | 25.660.496.575 | 18.214.451.082 | 33.142.203.748 | 99,53 | 99,01 | 80,33 | 98,54 | 99,67 | | |
| Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam | 1.652.000.000 | 654.000.000 | 750.000.000 | 1.700.000.000 | - | 1.639.310.750 | 652.893.500 | 748.164.700 | 1.695.234.612 | - | 99,23 | 99,83 | 99,76 | 99,72 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|
| membangun desa | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam | 100.000.000 | 110.000.000 | - | 30.000.000 | - | 99.700.000 | 30.407.500 | - | 29.137.875 | - | 99,70 | 27,64 | | 97,13 | | | |
| Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan | 114.419.283.050 | 30.314.967.000 | 48.763.815.325 | 30.067.234.055 | 13.032.367.450 | 113.105.907.009 | 29.158.374.910 | 44.469.787.600 | 29.484.310.875 | 11.382.945.397 | 98,85 | 96,18 | 91,19 | 98,06 | 87,34 | | |
| Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran | - | 1.000.792.000 | 1.008.956.075 | 1.156.770.825 | - | - | 829.087.300 | 873.892.345 | 717.282.325 | - | | 82,84 | 86,61 | 62,01 | | | |
| Program pengelolaan areal pemakaman | 300.000.000 | 200.000.000 | - | - | 75.000.000 | 297.433.075 | 199.799.700 | - | - | 74.775.100 | 99,14 | 99,90 | | | 99,70 | | |
| Program Rehabilitasi/pemeliharaan talud/Bronjong | - | 1.474.000.000 | 1.612.000.000 | 868.000.000 | 673.169.000 | - | 1.400.827.321 | 977.991.575 | 842.111.850 | 624.252.635 | | 95,04 | 60,67 | 97,02 | 92,73 | | |
| Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga | 235.000.000 | 400.000.000 | 500.000.000 | 946.000.000 | 1.439.000.000 | 233.575.000 | 363.300.000 | 498.612.650 | 943.712.400 | 1.280.536.000 | 99,39 | 90,83 | 99,72 | 99,76 | 88,99 | | |
| Program Pembangunan Sistem Informasi / Data Base Jaringan Irigasi | - | - | - | 100.000.000 | 150.000.000 | - | - | - | 95.012.000 | 149.724.000 | | | | 95,01 | 99,82 | | |
| Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan | 100.000.000 | 100.000.000 | - | - | - | 99.000.000 | 98.725.000 | 200.000.000 | - | - | 99,00 | 98,73 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------|--------|-------|-------|--------|--|--|
| Program perencanaan pembangunan Ekonomi | - | 200.000.000 | 200.000.000 | - | - | - | 195.000.000 | - | - | - | | 97,50 | - | | | | |
| Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan | 8.716.142.250 | 7.330.620.000 | 8.168.853.100 | 5.432.066.700 | 3.809.596.900 | 8.195.182.050 | 7.059.487.850 | 7.650.740.350 | 5.346.441.250 | 4.781.204.800 | 94,02 | 96,30 | 93,66 | 98,42 | 125,50 | | |
| Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | - | 1.417.000.000 | 700.000.000 | - | 2.175.940.000 | - | 1.388.336.600 | 598.001.050 | - | 825.153.900 | | 97,98 | 85,43 | | 37,92 | | |
| Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya | 21.765.896.000 | 17.575.369.000 | 16.806.664.500 | 42.864.738.440 | 23.879.559.400 | 20.923.905.718 | 17.354.015.080 | 15.768.016.924 | 29.051.361.850 | 23.595.948.596 | 96,13 | 98,74 | 93,82 | 67,77 | 98,81 | | |
| Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku | 100.000.000 | - | - | - | - | 73.023.975 | - | - | - | - | 73,02 | | | | | | |
| Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi sungai, Danau dan sumber daya air lainnya | - | 457.500.000 | 2.327.688.500 | 375.000.000 | - | - | 151.689.800 | 379.142.450 | 374.510.000 | - | | 33,16 | 16,29 | 99,87 | | | |
| Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah | - | 383.900.000 | 929.000.000 | 71.620.000 | 2.201.016.000 | - | 378.705.000 | 804.623.475 | 66.118.850 | 2.201.000.000 | | 98,65 | 86,61 | 92,32 | 100,00 | | |
| Program Peningkatan Kualitas pelayanan | - | 5.000.000 | 5.500.000 | 3.900.000 | 4.299.950 | - | 4.999.750 | 5.403.550 | 3.899.575 | 3.969.875 | | 100,00 | 98,25 | 99,99 | 92,32 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------|-------|-------|-------|-------|--|--|
| perijinan dan pelayanan publik | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh | 26.034.723.000 | 18.860.000.000 | 19.625.197.500 | 20.542.025.000 | 23.334.010.000 | 24.635.688.353 | 15.923.544.037 | 19.598.640.412 | 20.531.107.560 | 22.997.131.741 | 94,63 | 84,43 | 99,86 | 99,95 | 98,56 | | |
| Program pembangunan infrastruktur perdesaan | 261.310.000 | 25.410.157.000 | 13.206.700.000 | 65.085.000 | 54.648.850 | 245.555.875 | 24.537.986.699 | 13.001.270.900 | 63.842.900 | 53.085.950 | 93,97 | 96,57 | 98,44 | 98,09 | 97,14 | | |
| Program pengaturan jasa usaha konstruksi | 30.000.000 | 35.000.000 | 173.200.000 | 44.636.400 | 44.636.400 | 29.999.850 | 34.990.000 | 115.428.200 | 36.193.800 | 36.740.550 | 100,00 | 99,97 | 66,64 | 81,09 | 82,31 | | |
| Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) | 71.500.000 | 69.074.000 | 269.074.000 | 100.000.000 | - | 39.110.950 | 48.137.125 | 69.055.000 | 99.810.050 | - | 54,70 | 69,69 | 25,66 | 99,81 | | | |

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan DPUTR Kab. Pati berdasarkan tugas dan fungsi utamanya kurun waktu lima tahun ke depan, perlu mengetahui dinamika tantangan dan peluang yang ada, guna mempertajam kebijakan pelayanan DPUTR Kab. Pati untuk mendukung pencapaian target dan sasaran Renstra PD. Berikut tantangan dan peluang pengembangan pelayanan DPUTR Kabupaten Pati :

1. Tantangan

Dari telaah Renstra Kementerian Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat dan Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah (PU SDA dan Penataan Ruang) (DISPERAKIM) dan (Dinas kebersihan) tantangannya adalah:

- a. Pembangunan infrastruktur ke depan perlu diarahkan tidak hanya dititikberatkan untuk mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi wilayah (*engine of growth*), namun juga disinergikan dengan kelestarian lingkungan dengan memperhatikan *carrying capacity* suatu wilayah yang ingin di kembangkan. Pembangunan infrastruktur merupakan pemicu (*trigger*) terciptanya pusat-pusat pertumbuhan baru (*new emerging growth center*) yang menjadi cikal bakal lahirnya pusat perekonomian baru yang menjadi penyeimbang pertumbuhan ekonomi wilayah dan mengurangi kesenjangan antar wilayah.
- b. Pembangunan infrastruktur untuk mengurangi urbanisasi, pemenuhan kebutuhan dasar, serta peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat yang pada akhirnya untuk menjaga stabilitas dan kesatuan nasional.
- c. Meningkatkan ketahanan air, kedaulatan pangan dan kedaulatan energi guna menggerakkan sektor – sektor strategis ekonomi domestik.
- d. Dukungan terhadap konektivitas nasional guna meningkatkan produktivitas, efisien, dan pelayanan system logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada

keterpaduan konektivitas daratan dan maritim untuk mendukung pengembangan kawasan.

- e. Pembangunan infrastruktur perlu adanya pendekatan secara terpadu oleh seluruh sektor yang bertitik tolak dari sebuah rencana yang senergi dan mengacu kepada aktivitas ekonomi, sosial, keberlanjutan lingkungan hidup, potensi wilayah dan kearifan lokal serta rencana tata ruang wilayah.
 - f. Pembangunan infrastruktur yang berakibat kepada kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
 - g. Semakin besarnya konflik antar pengguna air.
 - h. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam mendukung pengelolaan sumber daya air.
 - i. Masih kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terkait tata ruang.
 - j. Rusaknya daerah tangkapan air.
2. Peluang

Merujuk pada tantangan di atas, peluang yang diidentifikasi tersedia di Kabupaten Pati untuk menjawab tantangan tersebut yaitu:

1. Pengembangan pusat – pusat pertumbuhan ekonomi, dalam rangka percepatan dan perluasan pengembangan ekonomi dengan memanfaatkan potensi dan keunggulan daerah.
2. Peningkatan peran dan fungsi sekaligus perbaikan manajemen pembangunan, pemberian bimbingan teknis dan penerapan SPM, guna meningkatkan daya saing dan kontribusi ekonomi.
3. Penanggulangan bencana dan pengurangan resiko bencana dengan meningkatkan kapasitas pengendali daya rusak air serta meningkatkan kapasitas masyarakat dalam rangka mengurangi indeks resiko bencana pada wilayah yang memiliki indeks risiko bencana tinggi untuk mengurangi kerugian akibat kejadian bencana di amsa mendatang.
4. Pemberdayagunaan sumber daya air yang di tujukan agar terpenuhinya kebutuhan air untuk kehidupan sehari-hari masyarakat serta untuk kebutuhan sosial dan ekonomi.

5. Adanya Perda Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010-2030.
6. Adanya pola pengelolaan sumber daya air wilayah sungai se-Jawa Tengah.
7. Adanya potensi sumber daya air yang besar.
8. Adanya bantuan dana pembangunan infrastruktur dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.
9. Adanya wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air antara Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.
10. Adanya wadah koordinasi terkait perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten.

Berdasarkan analisis di atas, secara garis besar jenis layanan yang diselenggarakan DPUTR Kab. Pati dalam kurun waktu tahun 2017-2022 yaitu:

1. Pengembangan sistem e-planning guna mendukung pencapaian indikator kinerja daerah menuju pencapaian kesejahteraan masyarakat dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
2. Peningkatan infrastruktur pelayanan dasar yang beresiko terjadinya bencana.
3. Pemenuhan Pelayanan Rumah Tangga Terhadap air bersih dan akses sanitasi.
4. Pemberian informasi tentang tata ruang.
5. Pengelolaan Daerah Irigasi yang menjadi kewenangan Kabupaten.
6. Penanggulangan daya rusak air baik secara darurat maupun rehabilitasi.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD.

Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pati, Sedangkan Kepegawaiannya berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Pati Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pati mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta pertanahan dan tugas pembantu yang di berikan kepada daerah.

Posisi DPUTR sebagai perangkat daerah, sesuai tugas dan fungsinya merujuk pada isu daerah :

1. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan;
2. Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel dan SDM yang kompeten;
3. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Daerah, Mendukung Pengembangan Ekonomi Daerah.

Dari isu di atas DPUTR. Permasalahan yang teridentifikasi sebagai berikut;

| No | Masalah Pokok (sub isu sesuai tupoksi) | Masalah (Indikator tujuan) | Akar Masalah (semua indikator program terbaru) |
|----|--|--|--|
| 1 | Ketersediaan infrastruktur dasar | 1. Penyediaan infrastruktur SDA belum optimal | Keterbatasan anggaran |
| | | | Keterbatasan kualitas dan kuantitas SDM |
| | | 2. Keterbatasan kewenangan penanganan infrastruktur sumber daya air | Ada pembagian kewenangan pengelolaan aset |
| | | 3. Infrastruktur yang menjadi kewenangan bidang kebinamargaan terlalu banyak | Penggunaan infrastruktur yang melebihi kapasitas |
| | | | Kondisi alam yang kurang mendukung |
| | | | Kesadaran masyarakat yang kurang |
| | | | Koordinasi antar instansi yang tidak optimal |
| 2 | Penataan ruang sebagai pendukung pertumbuhan wilayah | 1. Rencana tata ruang belum bisa mengakomodir dinamika pembangunan daerah | Adanya target terkait luasan peruntukan kawasan dari Provinsi/Pusat seperti kawasan peruntukan pertanian, kawasan kehutanan, kawasan karst yang mempengaruhi luasan kawasan yang boleh terbangunan (kawasan peruntukan permukiman dan kawasan peruntukan industri) |
| | | 2. Pemanfaatan ruang oleh sebagian masyarakat masih belum sesuai dengan rencana tata ruang | SDM di Bidang Penataan Ruang sangat terbatas terutama yang mempunyai kemampuan di bidang pemetaan, perencanaan pembangunan wilayah. |
| | | 3. Belum optimalnya perencanaan dengan kebutuhan ruang terbuka publik | Kurangnya standar Hasil ruang terbuka Publik |
| | | 4. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas infrastruktur | |

Tabel 3.1 Tabel identifikasi permasalahan yang ada di DPUTR Kab. Pati

3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

VISI Pembangunan Kabupaten Pati yaitu: **”Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat dan Pelayanan Publik”** dalam mewujudkan Visi tersebut ditetapkan tujuh (7) Misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan Akhlak, Budi Pekerti Sesuai Budaya dan Kearifan Lokal (Pendidikan Akhlak dan Budi Pekerti);
2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Peningkatan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan (Pendidikan dan Kesehatan);
3. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan (Pengentasan Kemiskinan);
4. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel dan Mengutamakan Pelayanan Publik (Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik);
5. Meningkatkan Pemberdayaan UMKM dan Pengusaha, Membuka Peluang Investasi dan Memperluas Lapangan Kerja (Lapangan Kerja).;
6. Meningkatkan Daya Saing Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Pertanian, Perdagangan dan Industri (Daya Saing Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi);
7. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Daerah, Mendukung Pengembangan Ekonomi Daerah (Infrastruktur Daerah);
8. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Guna Mendukung Pembangunan yang Berkelanjutan (Lingkungan Hidup).

Berdasarkan Misi Kabupaten Pati tersebut diatas, DPUTR Kab.Pati mengemban tugas pada misi ke Tiga (3), Empat (4) dan Tujuh (7), yaitu Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Daerah, Mendukung Pengembangan Ekonomi Daerah (Infrastruktur Daerah);

Adapun tujuan dari misi tersebut adalah meningkatkan ketersediaan infrastruktur wilayah yang berkualitas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan wilayah. Sasaran yang

dituju oleh DPUTR Kab,Pati dalam melaksanakan misi tersebut adalah:

1. Terpenuhinya kebutuhan konektivitas wilayah;
2. Terpenuhinya infrastruktur fisik dan sosial sesuai kebutuhan;
3. Pemanfaatan ruang dan pengembangan kawasan sesuai fungsinya.

**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan PD
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah**

| No | Misi KDH dan Wakil KDH terpilih | Permasalahan Pelayanan PD | Faktor | |
|-----|--|--|---|---|
| | | | Penghambat | Pendorong |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | Misi 3 Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan | Ketersediaan Air Bersih untuk Kebutuhan Rumah Tangga | 1. Pemanfaatan Instalasi Pengelolaan Air Bersih diperkotaan dan perdesaan yang tidak optimal. 2. Semakin sulitnya mencari sumber mata air yang memadai | 1. Tersedianya Instalasi Pengelolaan Air Bersih di perkotaan dan perdesaan. 2. Anggaran yang cukup besar untuk kegiatan air bersih |
| | Misi 4 Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, demokratis dan mengutamakan pelayanan publik | Ketepatan Pemanfaatan Ruang sesuai dengan Peruntukan Ruang | 1.Masih lemahnya kesadaran masyaakat dalam melihat RTRW 2. Manajemen Sistem data dan informasi belum akurat dan terintegrasi | 1.Sudah di tetapkannya RTRW yang baru. 2. Tesedianya Peta citra sebagai pedoman dalam pembangunan 3. Banyak diklat/ pelatihan tentang sistem GIS |
| | Misi 7 Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Daerah, Mendukung Pengembangan Ekonomi Daerah | Sarana publik seperti jalan, drainase, turap dalam kondisi baik masih dibawah 72% | 1.Kebutuhan pembiayaan konstruksi yang besar untuk mewujudkan infratraktur yang mantap. 2. Penggunaan Infrastruktur yang melebihi | 1. Dukungan Bupati pada Misi ke - 7 tentang infrastruktur. 2. Tuntutan dan kebutuhan masyarakat atas kondisi infrastruktur |

| | | | | |
|--|--|--|---|--|
| | | | <p>kapasitas</p> <p>3 . Kondisi alam yang kurang mendukung</p> <p>4. Kesadaran masyarakat yang kurang</p> <p>5. Koordinasi Antar instansi dalam mendukung ketersediaan infrastruktur kurang</p> | <p>yang baik.</p> <p>3. Semakin meningkatnya alokasi anggaran untuk infrastruktur yang bersumber dari APBD Kab.</p> <p>4. Semakin meningkatnya alokasi dana yang bersumber dari APBN (DAK) dan APBD Provins Jawa Tengah Melalui Bantuan Keuangan sarana dan prasarana.</p> |
|--|--|--|---|--|

Tabel 3.2 Faktor penghambat dan pendorong yang ada di DPUTR Kab. Pati

Merujuk pada telaah unsur visi misi Bupati terpilih, tantangan isu strategis yang dihadapi Bappeda untuk mewujudkan Pati yang Sejahtera dan Pelayanan Publik yang prima adalah :

1. Dibidang Binamarga, tantangan isu strategis yang dihadapi adalah Masih banyaknya Ruas jalan yang kondisi jalanya masih rusak, kurang mantap, banyak ruas jalan lebarnya belum memadai menjadi jalan kolektor, masih banyak jembatan/gorong-gorong yang belum memenuhi standatr konstruksi dan dimensi
2. Dibidang Sumber Daya Air tantangan isu strategis yang dihadapi adalah: :Masih belum mencukupinya Air baku untuk pertanian, Kondisi jaringan irigasi yang belum optimal, masih sering terjadinya bencana alam akibat daya rusak air yang besar..
3. Dibidang Cipta Karya tantangan isu strategis yang dihadapi adalah masih banyaknya gedung aparatur yang belum representatif, belum tertatanya bangunan dengan optimal, masih tingginya genangan ketika musim penghujan.

4. Dibiidang Penataa Ruang dan Pertanahan tantangan isu strategis yang dihadapi adalah 1).alih fungsi lahan khususnya lahan pertanian dengan rencana tata ruang. 2). Kesadaran masyarakat terhadap pemanfaatan ruang masih rendah. 3). Minimnya prosentase luasan ruang terbuka hijau (RTH) publik di kawasan perkotaan. 4). Masih adanya konflik terkait kepemilikan dsn penguasaan tanah.
5. Dibiidang Kebersihan dan Pertamanan tantangan isu strategis yang dihadapi adalah masih belum optimalnya pengangkutan sampah rumah tangga ke TPA, kurangnya faslitas Alat angkut sampah serta SDM, Kurangnya rung terbuka pulik ramah anak.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

1. Telaah Renstra Kementerian PUPR

PRencana Strategis (Renstra) Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merupakan arahan penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum dijabarkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Kementrian Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat guna mencapai sasaran – sasaran strategis kementrian. Pembangunan Jangka Panjang Nasional di tetapkan dalam UU No. 17 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 yang kemudian di jabarkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). RPJMN yang saat ini telah sampai pada tahap ketiga diarahkan untuk mempersiapkan proses tinggal landas menuju masyarakat indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur, yaitu memantapkan pembangunan yang menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian pada daya saing kompetitif, perekonomian berdasar keunggulan sumber daya alam, dan sumber dya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi ysng terus meningkat.

Strategi pembangunan nasional selama 5 (lima) tahun kedepan sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 berdasarkan kepada:

A. Norma Pembangunan, meliputi antara lain: 1) membangun untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat; 2) setiap upaya meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran, produktivitas tidak boleh menciptakan ketimpangan yang makin melebar yang dapat merusak keseimbangan pembangunan; 3) aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan mengganggu keseimbangan ekosistem.

B. Dimensi Pembangunan;

1. Dimensi pembangunan manusia dan masyarakat. Pembangunan mental dan karakter menjadi salah satu prioritas utama pembangunan, tidak hanya di birokrasi tetapi juga pada seluruh komponen masyarakat.

2. Dimensi pembangunan sektor unggulan. Hal ini meliputi kedaulatan pangan, ketahanan energi dan ketenagalistrikan, kemaritiman dan kelautan. Pariwisata dan industri. Terkait dengan kedaulatan pangan, Indonesia mempunyai modal untuk memenuhi kebutuhannya agar tidak tergantung kepada negara lain. Potensi sumber daya air yang besar dan terbarukan dapat di manfaatkan untuk mendukung ketahanan energi dan ketenagalistrikan.

3. Dimensi pemerataan dan kewilayahan. Pembangunan harus meminimalkan kesenjangan, baik antar kelompok pendapatan, maupun antar wilayah, serta untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dengan prioritas pada wilayah desa, wilayah pinggiran, luar Jawa dan kawasan timur.

C. Kondisi sosial, politik, hukum. Dan keamanan yang stabil. Hal ini meliputi kepastian dan penegakan hukum, keamanan, dan

ketertiban, politik dan demokrasi, serta tatakelola dan reformasi birokrasi.

- D. Quickwins. Quickwins dilakukan agar output pembangunan segera dapat terwujud dan dirasakan hasilnya dan sekaligus dapat meningkatkan motivasi dan partisipasi masyarakat.

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Renstra tersebut memerlukan koordinasi, konsolidasi, dan sinergi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Oleh karenanya penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum perlu dilandasi dengan kerangka peraturan perundang-undangan yang mantap dan suportif dan menjadi dasar bagi penyelenggaraan pembangunan infrastruktur ke depan yang lebih terpadu dan efektif yang mengedepankan proses partisipatif dan menghasilkan output dan outcome yang optimal.

Koordinasi dan integrasi baik secara vertikal maupun secara horizontal yang semakin kuat, akan memberikan keyakinan bahwa pencapaian sasaran – sasaran strategis kementerian yang mempunyai cakupan secara nasional dan secara fungsional strategis bermanfaat untuk mendukung kebutuhan sosial ekonomi masyarakat, pengembangan wilayah, dan mendukung sektor lainya akan menjadi kenyataan.

Pembangunan infrastruktur kedepan di arahkan untuk pengembangan wilayah untuk dapat menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi wilayah dan mengurangi kesenjangan antar wilayah, berdasarkan hal tersebut maka, arah kebijakan pembangunan infrastruktur bidang pekerjaan umum tahun 2015 – 2019 meliputi 1) untuk meningkatkan ketahanan air, kedaulatan pangan dan kedaulatan energi guna menggerakkan sektor – sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi, akan dilakukan melalui pemenuhan kebutuhan air baku untuk segala kebutuhan peningkatan kinerja jaringan irigasi rawa, peningkatan pengendali daya rusak air, peningkatan upaya konservasi sumber daya air, peningkatan kinerja operasi dan

- pemeliharaan sarana dan prasarana sumber daya air.
- 2) Mempercepat pembangunan infrastruktur jalan untuk mendukung konektivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim.
 - 3) Peningkatan pelayanan air minum dengan pembangunan SPAM melalui anggaran DAK yang cukup besar.
 - 4) Pengembangan struktur tata ruang dan pengembangan pola ruang.
 - 5) Peningkatan pemenuhan akses sanitasi bagi Masyarakat.

2. Telaah Renstra Dinas Pekerjaan Umum Bina marga dan Cipta Karya Prov. Jawa Tengah.

Renstra Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Prov. Jateng, mengacu pada misi ke-6 dan ke-7 Yaitu misi ke-6 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan misi ke-7: Meningkatkan infrastruktur untuk mempercepat pembangunan Jawa Tengah yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Prov. Jateng untuk mencapai misi tersebut dengan melakukan:

1. Melaksanakan pemeliharaan rutin jalan supaya kondisi jalan baik.
2. Meningkatkan panjang dan lebar jalan dan jembatan yang struktur konstruksinya sesuai dengan jalan kolektor.
3. Meningkatkan kapasitas dan kualitas air minum dan sanitasi.

2. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah.

Renstra Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jateng, sama dengan DPU Bina Marga dan Cipta Karya yaitu misi ke-6 dan misi ke-7. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jateng untuk mencapai misi tersebut dengan melakukan:

- a. Meningkatkan infrastruktur pertanian dengan meningkatkan kinerja layanan jaringan irigasi dan ketersediaan air baku dan partisipasi masyarakat.
- b. Meningkatkan daya dukung pelayanan transportasi dengan meningkatkan penanganan banjir.
- c. Rencana pengembangan prasarana sumber daya air berpedoman pada pengelolaan sumber daya air, meliputi: Pengembangan irigasi, waduk, embung, jaringan air bersih, jaringan irigasi.
- d. Pengembangan embung, yang meliputi: pembuatan embung di setiap kab./Kota untuk kebutuhan air baku, pertanian, dan pengendali banjir.
- e. Pembuatan area resapan air melalui program konservasi lahan tidak produktif, dan konservasi embung-embung eksisting yang ada di Jawa Tengah.

3. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Prov. Jawa Tengah.

Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jateng, bertujuan meningkatkan tertib administrasi pertanahan secara terpadu, peningkatan pelayanan air minum bagi penduduk Jawa Tengah Peningkatan Akses penduduk terhadap sanitasi layak (air limbah domestik, sampah dan drainase lingkungan). Pelaksanaan Undang-undang no. 2 tahun 2012 yang berlaku secara efektif sejak 1 Januari 2015 sehingga seluruh proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum baik di tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil perlu dilaksanakan menurut ketentuan perundangan ini.

3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah

Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang. Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengamanatkan setiap kabupaten/kota untuk menyusun rencana umum dan rencana rinci tata ruang. Rencana umum tata ruang Kabupaten Pati telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010-2030.

RTRW Kabupaten Pati memuat tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang, arahan pemanfaatan ruang, ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, indikasi program, dan ketentuan umum peraturan zonasi. Kebijakan pemanfaatan ruang meliputi arahan lokasi dari kawasan yang harus dilindungi, lokasi pengembangan kawasan budidaya termasuk kawasan produksi dan kawasan permukiman, pola jaringan prasarana dan wilayah-wilayah yang akan diprioritaskan pengembangannya dalam kurun waktu perencanaan.

Sebagai landasan operasional dalam pengendalian pemanfaatan ruang, khususnya proses perizinan dalam pemanfaatan ruang diperlukan rencana tata ruang yang bersifat lebih rinci / detail terutama pada kawasan perkotaan dan strategis, serta kawasan yang diarahkan menjadi kawasan perkotaan, yaitu dalam bentuk rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi.

3.4.2 Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Untuk menjamin bahwa kegiatan pembangunan tidak merusak lingkungan sekaligus menjamin keberlanjutan pembangunan itu sendiri, Pemerintah telah menetapkan perundang-undangan mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Ketentuan tersebut terdapat pada Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam UU tersebut disebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Dalam konteks amanat undang-undang ini, penyusunan rencana tata ruang wajib disertai KLHS, seperti yang tercantum secara eksplisit pada Undang-Undang No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 15 ayat (2) huruf a dan pasal 19 ayat (1). Oleh karena itu, Dokumen RTRW Kabupaten Pati juga dilengkapi dengan dokumen KLHS sesuai mandat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Mengingat RTRW Kabupaten Pati sudah tersusun, maka penyusunan KLHS RTRW Kabupaten Pati dilakukan dengan metode cepat sesuai Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor : 660/5113/SJ dan Nomor : 04/MENLH/12/2010 Tanggal : 29 Desember 2010.

Saat ini sedang dilakukan proses revisi terhadap Perda Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010-2030. Terkait proses revisi Perda tersebut maka dilakukan pula penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Revisi RTRW Kabupaten Pati dengan mengacu PP Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/MenLHK/Setjen/Kum.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.

Berangkat dari identifikasi permasalahan yang dihadapi dan meningkatnya dinamika kehidupan social,ekonomi,budaya dan politik masyarakat serta pengembangan wilayah di provinsi jawa tengah, membuat semakin tinggi dan dan vitalnya peran infrastruktur sebagai sarana publik untuk dapat semakin mengimbangi tuntutan masyarakat. Selain itu, infrastruktur juga terkait erat dengan koneksitas regional dan nasional, yang mendukung penguatan posisi jawa tengah secara regional dan nasional. Maka dirumuskan isu strategis pembangunan daerah jawa tengah melalui berbagai pertimbangan diantaranya memiliki pengaruh besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional. Adapun isu strategis DPUTR Kab.Pati pada periode 2017-2022, adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya cakupan pelayanan air minum dan sanitasi;
2. Adanya ruas jalan yang kondisi tanah dasarnya ekspansif (kembang susut tinggi), berpotensi longsor, rawan banjir dan rawan kecelakaan;
3. Masih banyaknya jalan dan jembatan yang belum sesuai stândar kapasitas sebagai jalan kolektor;
4. Pembangunan konservasi air yang belum optimal;
5. Belum tercukupinya kebutuhan air baku, terutama di daerah Pati Selatan.
6. Masih minimnya pembangunan penampung air permukaan.
7. Kurangnya luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik di kawasan perkotaan;
8. Kesadaran masyarakat yang masih kurang.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra DPUTR Kab. Pati

Tujuan yang hendak dicapai oleh DPUTR Kab. Pati adalah

1. Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Miskin;
2. Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel dan SDM yang kompeten;
3. Terpenuhinya infrastruktur bagi pengembangan produktivitas ekonomi, konektivitas wilayah dan pengembangan kawasan.

Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah :

1. Terpenuhinya infrastruktur fisik dan sosial sesuai kebutuhan;
2. Pemanfaatan ruang dan pengembangan kawasan sesuai fungsinya;
3. Terpenuhinya kebutuhan konektivitas wilayah.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Tujuan/sasaran | Target Kinerja Tujuan/Sasaran | | | | | |
|-----|--|---|---|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | | pada Tahun ke- | | | | | |
| | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 1 | meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Miskin | | Tersedianya air baku sampai tahun 2022 (air bersih dan irigasi) | 80,60 % | 81,75 % | 83,88 % | 85,07 % | 86,26 % | 88,37 % |
| | | Terpenuhinya infrastruktur fisik dan sosial sesuai kebutuhan | Kapasitas air bersih daerah | 74,80 % | 75,20 % | 76,02 % | 76,72 % | 77,39 % | 78,03 % |
| | | | Luas genangan | 3.350,84 m ² | 3.290,84 m ² | 3.230,84 m ² | 3.150,84 m ² | 3.070,84 m ² | 2.990,84 m ² |
| | | | Persentase gedung pemerintahan dalam kondisi baik | 14,29 % | 22,62 % | 28,57 % | 34,52 % | 40,48 % | 46,43 % |
| | | | Pembinaan jasa konstruksi | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| | | | Prosentase jaringan irigasi dalam kondisi baik | 80 % | 81 % | 83 % | 84 % | 85 % | 87 % |
| | | | Persentase sungai dalam kondisi baik | 40 % | 43 % | 46 % | 50 % | 55 % | 60 % |
| | | | Kapasitas air irigasi daerah | 301.939.200 m ³ | 305.713.440 m ³ | 313.261.920 m ³ | 317.036.160 m ³ | 320.810.400 m ³ | 328.358.880 m ³ |
| | | | Persentase Penanganan Sampah perkotaan | 31,37 % | 34,12 % | 36,74 % | 39,26 % | 41,66 % | 43,95 % |

| | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | | Rasio Ruang terbuka Hijau persatuan luas wilayah ber HPL/HGb | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % |
| 2. | Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel dan SDM yang kompeten | | Persentase Ketepatan Pemanfaatan Ruang sesuai dengan Peruntukan Ruang | 36,14 % | 41,14 % | 46,14 % | 51,14 % | 56,14 % | 61,14 % |
| | | Pemanfaatan ruang dan pengembangan kawasan sesuai fungsinya | Ketaatan terhadap RTRW Kabupaten | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| | | | Rencana tata ruang yang ditetapkan | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| | | | Persentase penanganan permasalahan pertanahan | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| 3 | Terpenuhinya infrastruktur bagi pengembangan produktivitas ekonomi, konektivitas wilayah dan pengembangan kawasan | | Persentase Jalan Kondisi Baik | 62 % | 65 % | 68 % | 71 % | 74 % | 77 % |
| | | | Persentase Jembatan Kondisi Baik | 75 % | 76 % | 77 % | 78 % | 79 % | 80 % |

| | | | | | | | | | |
|--|--|---|------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| | | Terpenuhinya kebutuhan konektivitas wilayah | Panjang jalan kondisi baik | 908,91 km | 952,89 km | 996,86 km | 1040,84 km | 1084,82 km | 1128,80 km |
| | | | Jumlah jembatan kondisi baik | 272 unit | 275 unit | 279 unit | 283 unit | 287 unit | 290 unit |

BAB V

Strategi dan Arah Kebijakan

5.1. Strategi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab.Pati

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Rumusan strategi menunjukkan upaya OPD menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi *stakeholder* layanan.

Strategi adalah cara/langkah-langkah yang berisikan kebijakan dan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi Bupati yang tertuang dalam RPJMD tahun 2017-2022.

Arah **Kebijakan** adalah arah/tindakan yang diambil oleh Perangkat daerah untuk mencapai tujuan. Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Strategi dan Arah Kebijakan DPUTR Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 tertuang dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

| VISI : "MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DAN PELAYANAN PUBLIK" | | | |
|---|--|---|--|
| MISI 3 : Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan | | | |
| MISI 4 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel dan Mengutamakan Pelayanan Publik | | | |
| MISI 7 : Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Daerah, Mendukung Pengembangan Ekonomi Daerah | | | |
| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
| Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Miskin | Terpenuhinya infrastruktur fisik dan sosial sesuai kebutuhan | <ul style="list-style-type: none"> - Membangun sistem layanan air minum dan sanitasi . - Membangun sistem penataan jaringan air minum yang terintegrasi dengan sumber – sumber mata air atau tempat penampungan air . | <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan sinkronisasi dengan APBN serta sektor sumber daya air untuk pembangunan SPAM. - Berkerjasama dengan daerah lain dalam pemanfaatan layanan air minum dengan SPAM Regional. |
| Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel dan SDM yang kompeten | Pemanfaatan ruang dan pengembangan kawasan sesuai fungsinya | <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan regulasi tentang perencanaan tata ruang - Pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang | <ul style="list-style-type: none"> - Menyusun rencana umum dan rencana detail tata ruang - Meningkatkan pemahaman dan ketaatan masyarakat |

| | | | |
|--|--|---|--|
| | | | <p>terhadap tata ruang</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memberikan akses informasi tata ruang |
| <p>Terpenuhinya infrastruktur bagi pengembangan produktivitas ekonomi, konektivitas wilayah dan pengembangan kawasan</p> | <p>Terpenuhinya kebutuhan konektivitas wilayah</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Mempertahankan kondisi jalan dan jembatan sesuai dengan tingkat kerusakan dan tingkat kemendesakan. - Melakukan penanganan jalan dengan peningkatan konstruksi dan pelebaran - Meningkatkan kapasitas air baku . - Mengurangi daya rusak air | <ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan pemeliharaan rutin untuk jalan . - Melaksanakan peningkatan struktur konstruksi jalan utamanya pada ruas jalan yang merupakan jalan kabupaten. - Melaksanakan peningkatan kapasitas/pelebaran jalan pada ruas alternatif jalan Kab. (sejajar pantura), akses langsung jalan propinsi maupun nasional, penghubung pantura ,akses pariwisata, perbatasan antar Kabupaten. - menjaga Jaringan Irigasi dengan melibatkan peran serta masyarakat (GP3A). - Pembangunan konservasi air |

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan Renstra DPUTR Kab.Pati

Renstra DPUTR Kabupaten Pati dalam mendukung pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2017-2022, penjabaran program dan kegiatan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan adalah sebagai berikut :

Tabel. VI.1
Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan
Renstra DPUTR Kab. 2017 - 2022

| | | | | | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung-jawab | | | |
|---|----|----|----|----|--|--|--|--|------------|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|-----------------------------------|---|-----------------------|----------------|
| | | | | | | | | Tahun-1 2018 | | Tahun-2 2019 | | Tahun-3 2020 | | Tahun-4 2021 | | Tahun-5 2022 | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | |
| | | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | Target | Rp. | |
| | | | | | | | | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | | (15) | (16) | |
| | | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | |
| | | | | | Urusan Wajib | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Terkait Pelayanan Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Non Urusan | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 03 | 01 | 00 | 01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Meningkatnya Pelayanan administrasi perkantoran | 100% | 100% | 2.828.946 | 100% | 3.317.482 | 100% | 3.695.680 | 100% | 4.076.598 | 100% | 4.439.108 | 100% | 18.357.814 | DPUTR KAB.PATI | |
| | | | | 01 | 01 | Penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah surat yang terlayani selama setahun. | 1000 surat | 1000 surat | 4.550 | 1000 surat | 6.500 | 5000 surat | 30.550 | DPUTR KAB.PATI |
| | | | | 01 | 02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Jumlah rekening telepon, air dan listrik yang dibayarkan selama setahun. | 228 Rek | 228 Rek | 415.000 | 228 Rek | 480.000 | 228 Rek | 530.000 | 228 Rek | 595.000 | 228 Rek | 610.000 | 1140 Rek | 2.630.000 | DPUTR KAB.PATI |
| | | | | 01 | 03 | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor | Jumlah unit peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan selama setahun. | 266 buah | 266 buah | 164.026 | 266 buah | 180.000 | 266 buah | 198.000 | 266 buah | 217.800 | 266 buah | 239.580 | 1430 buah | 999.406 | DPUTR KAB.PATI |
| | | | | 01 | 06 | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | Jumlah izin kendaraan dinas yang disediakan selama setahun. | 152 SIK | 217 SIK | 130.950 | 227 SIK | 150.000 | 237 SIK | 165.000 | 247 SIK | 181.500 | 182 SIK | 199.650 | 1110 SIK | 827.100 | DPUTR KAB.PATI |
| | | | | 01 | 08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Jumlah layanan jasa kebersihan yang disediakan selama setahun. | 12 Bulan | 12 Bulan | 112.400 | 12 Bulan | 150.000 | 12 Bulan | 165.000 | 12 Bulan | 181.500 | 12 Bulan | 199.650 | 60 Bulan | 808.550 | DPUTR KAB.PATI |
| | | | | 01 | 10 | Penyediaan alat tulis kantor | Jumlah alat tulis kantor yang disediakan selama setahun. | 8692 Unit | 8.692 Unit | 90.198 | 8692 Unit | 110.000 | 8692 Unit | 140.000 | 8692 Unit | 150.000 | 8692 Unit | 150.000 | 43460 unit | 640.198 | DPUTR KAB.PATI |
| | | | | 01 | 11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah barang cetakan, penggandaan dan penjilidan selama setahun | 323 Rim | 335 Rim | 42.457 | 357 Rim | 50.000 | 392 Rim | 55.000 | 432 Rim | 60.500 | 475 Rim | 66.550 | 1.992 Rim | 274.507 | DPUTR KAB.PATI |
| | | | | 01 | 12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan selama setahun. | 439 buah | 439 buah | 11.523 | 439 buah | 19.482 | 439 buah | 21.430 | 439 buah | 23.573 | 439 buah | 25.931 | 2.195 buah | 101.939 | DPUTR KAB.PATI |
| | | | | 01 | 13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan dalam setahun | - | - | - | 250 botol, 30 unit, 6 buah, 100 tabung | 35.000 | 250 botol, 30 unit, 6 buah, 100 tabung | 41.500 | 250 botol, 30 unit, 6 buah, 100 tabung | 49.650 | 250 botol, 30 unit, 6 buah, 100 tabung | 69.615 | 1000 tabung, 120 unit, 6 buah, 100 tabung | 195.765 | DPUTR KAB.PATI |

| | | | | | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung-jawab | | |
|---|----|----|----|----|---|---|--------------------------------------|--|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-----------------------------------|--|-----------------------|
| | | | | | | | | Tahun-1 2018 | | Tahun-2 2019 | | Tahun-3 2020 | | Tahun-4 2021 | | Tahun-5 2022 | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | |
| | | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | Target | Rp. |
| | | | | | | | | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | | (15) | (16) |
| | | | 01 | 15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan selama setahun. | 1.460 Eksemplar | 1.460 Eksemplar | 8.982 | 1.460 Eksemplar | 15.000 | 1.460 Eksemplar | 16.500 | 1.460 Eksemplar | 18.150 | 1.460 Eksemplar | 19.965 | 7.300 Eksemplar | 78.597 | DPUTR KAB.PATI |
| | | | 01 | 16 | Penyediaan bahan logistik kantor | Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan selama setahun. | 1500 galon | 1500 galon | 27.000 | 1500 galon | 33.000 | 1500 galon | 36.300 | 1500 galon | 39.930 | 1500 galon | 43.923 | 7.500 galon | 180.153 | DPUTR KAB.PATI |
| | | | 01 | 17 | Penyediaan makanan dan minuman | Jumlah porsi makanan dan minuman yang disajikan selama setahun. | 1208 Porsi | 1208 Porsi | 24.785 | 1208 Porsi | 36.000 | 1208 Porsi | 39.600 | 1208 Porsi | 43.560 | 1208 Porsi | 47.916 | 6.040 Porsi | 191.861 | DPUTR KAB.PATI |
| | | | 01 | 18 | Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Jumlah notulen rapat koordinasi atau laporan perjalanan konsultasi ke luar daerah selama setahun. | 300 Laporan Perjalanan | 300 Laporan Perjalanan | 326.850 | 300 Laporan Perjalanan | 367.000 | 300 Laporan Perjalanan | 403.700 | 300 Laporan Perjalanan | 444.070 | 300 Laporan Perjalanan | 488.477 | 1.500 Laporan Perjalanan | 2.030.097 | DPUTR KAB.PATI |
| | | | 01 | 19 | Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis/keamanan | Jumlah tenaga pendukung administrasi/ teknis/ keamanan yang disediakan selama setahun. | 67 orang | 67 orang | 1.079.460 | 67 orang | 1.300.000 | 67 orang | 1.430.000 | 67 orang | 1.573.000 | 67 orang | 1.730.300 | 67 orang | 7.112.760 | DPUTR KAB.PATI |
| | | | 01 | 20 | Penyediaan administrasi pengadaan barang dan jasa | Jumlah penyelesaian administrasi pengadaan barang dan jasa selama setahun. | 600 Dokumen | 700 Dokumen | 110.522 | 800 Dokumen | 115.500 | 800 Dokumen | 150.150 | 800 Dokumen | 165.165 | 800 Dokumen | 181.682 | 3900 Dokumen | 723.018 | DPUTR KAB.PATI |
| | | | 01 | 22 | Penyediaan pendukung administrasi pengelolaan keuangan dan barang | Jumlah tenaga pendukung administrasi pengelolaan keuangan dan barang. | 33 Orang | 34 Orang | 280.244 | 34 Orang | 270.000 | 34 Orang | 297.000 | 34 Orang | 326.700 | 34 Orang | 359.370 | 170 Orang | 1.533.314 | DPUTR KAB.PATI |
| 1 | 03 | 01 | 00 | 02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik. | 100% | 100% | 31.157.708 | 100% | 11.316.032 | 100% | 10.016.032 | 100% | 11.616.032 | 100% | 12.229.997 | 100% | 76.335.801 | DPUTR KAB.PATI |
| | | | 02 | 03 | Pembangunan Gedung Kantor | Jumlah unit gedung kantor yang dibangun selama setahun. | 7 unit | 7 Unit | 22.049.817 | | | | | | | | | 7 Unit | 22.049.817 | DPUTR KAB.PATI |
| | | | 02 | 05 | Pengadaan kendaraan dinas/ operasional | Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang diadakan selama setahun | 20 unit | 23 unit | 1.825.000 | 37 unit | 2.115.000 | 15 Unit | 1.115.000 | 25 Unit | 2.115.000 | 25 Unit | 2.115.000 | 130 Unit | 9.285.000 | DPUTR KAB.PATI |
| | | | 02 | 09 | Pengadaan peralatan gedung kantor | Jumlah komulatif perlengkapan rumah jabatan/ dinas yang diadakan selama setahun. | 34 unit | 34 unit | 266.920 | 34 unit | 224.717 | 34 unit | 424.717 | 34 unit | 424.717 | 34 unit | 424.717 | 170 Unit | 1.765.788 | DPUTR KAB.PATI |
| | | | 02 | 10 | Pengadaan mebeleur | Jumlah komulatif mebeleur yang diadakan selama setahun. | 30 Unit | 30 Unit | 24.200 | 30 Unit | 100.000 | 30 Unit | 200.000 | 30 Unit | 200.000 | 30 Unit | 243.965 | 150 Unit | 768.165 | DPUTR KAB.PATI |

| | | | | | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung-jawab | | |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|---|--------------------------------------|--|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|-----------------------------------|--|-----------------------|
| | | | | | | | | Tahun-1 2018 | | Tahun-2 2019 | | Tahun-3 2020 | | Tahun-4 2021 | | Tahun-5 2022 | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | |
| | | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | Target | Rp. |
| | | | | | | | | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | | (15) | (16) |
| | | | 02 | 14 | Pengadaan alat-alat berat | Jumlah alat - alat berat yang di adakan selama setahun | - | - | 2 | 1.500.000 | 1 Unit | 600.000 | 2 Unit | 900.000 | 2 Unit | 1.050.000 | 8 Unit | 4.050.000 | DPUTR KAB.PATI | |
| | | | 02 | 17 | Pengadaan komputer dan kelengkapannya | Jumlah peralatan komputer dan kelengkapannya yang diadakan selama setahun. | 20 Unit | 20 Unit | 229.100 | 30 Unit | 221.315 | 100 Unit | 1.114.360 | DPUTR KAB.PATI |
| | | | 02 | 22 | Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor | Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor selama setahun. | 1.627 m2 | 1.627 m2 | 145.236 | 1.627 m2 | 400.000 | 1.627 m2 | 700.000 | 1.627 m2 | 800.000 | 1.627 m2 | 1.100.000 | 8.135 m2 | 3.145.236 | DPUTR KAB.PATI |
| | | | 02 | 24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional | Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional selama setahun. | 155 unit | 155 unit | 1.612.435 | 172 unit | 1.630.000 | 172 unit | 1.630.000 | 177 unit | 1.830.000 | 177 unit | 1.950.000 | 261 unit | 8.652.435 | DPUTR KAB.PATI |
| | | | 02 | 29 | Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur | Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala mebeleur selama setahun. | 40 unit | 40 unit | 5.000 | 80 unit | 125.000 | 360 Unit | 505.000 | DPUTR KAB.PATI |
| | | | 02 | 41 | Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas | Jumlah rumah dinas yang mengalami rehabilitasi sedang/ berat selama setahun | - | 1 unit | 5.000.000 | 5 unit | 5.000.000 | 5 Unit | 5.000.000 | 5 Unit | 5.000.000 | 5 Unit | 5.000.000 | 21 Unit | 25.000.000 | DPUTR KAB.PATI |
| 1 | 03 | 01 | 00 | 03 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur | 100% | 100% | 200.000 | 100% | 480.000 | 100% | 440.000 | 100% | 450.000 | 100% | 480.000 | 100% | 2.050.000 | DPUTR KAB.PATI |
| | | | 03 | 01 | Pengadaan Mesin/Kartu Absensi | Jumlah mesin/kartu absensi yang disediakan selama setahun | - | - | 10 Unit | 50.000 | 10 Unit | 20.000 | 10 Unit | 20.000 | 10 Unit | 20.000 | 40 Unit | 110.000 | DPUTR KAB.PATI | |
| | | | 03 | 02 | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | Jumlah stel pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan selama setahun. | 666 Stel | 666 Stel | 200.000 | 671 Stel | 280.000 | 3.350 Stel | 1.320.000 | DPUTR KAB.PATI |
| | | | 03 | 06 | Pembinaan Disiplin ASN | Presentase Laporan Kehadiran ASN | 0% | 0% | - | 90% | 150.000 | 90% | 160.000 | 95% | 170.000 | 95% | 200.000 | 95% | 680.000 | DPUTR KAB.PATI |
| 1 | 03 | 01 | 00 | 05 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 100% | 100% | 60.000 | 100% | 225.000 | 100% | 143.750 | 100% | 165.312 | 100% | 190.100 | 100% | 784.162 | DPUTR KAB.PATI |
| | | | 05 | 01 | Pendidikan formal dan pelatihan | Jumlah ASN yang melakukan kegiatan pendidikan dan pelatihan selama setahun | 46 org | 65 org | 60.000 | 70 org | 225.000 | 80 Org | 143.750 | 90 Org | 165.312 | 100 org | 190.100 | 405 org | 784.162 | DPUTR KAB.PATI |
| | | | 05 | 04 | Pendidikan dan Pelatihan Teknis | Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan Teknis selama setahun | - | - | - | 10 Org | 200.000 | 40 Org | 800.000 | DPUTR KAB.PATI |

| | | | | | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung-jawab | | |
|---|----|----|----|----|--|---|--------------------------------------|--|---------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|-----------------------------------|--|----------------|
| | | | | | | | | Tahun-1 2018 | | Tahun-2 2019 | | Tahun-3 2020 | | Tahun-4 2021 | | Tahun-5 2022 | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | |
| | | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | Target | Rp. |
| | | | | | | | | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | | (15) | (16) |
| 1 | 03 | 01 | 00 | 06 | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | Presentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 100% | 100% | 186.949 | 100% | 1.502.595 | 100% | 1.622.234 | 100% | 1.848.094 | 100% | 1.924.954 | 100% | 7.084.826 | DPUTR KAB.PATI |
| | | | 06 | 04 | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun selama setahun | 1 Laporan | 1 Laporan | 6.456 | 1 Laporan | 8.500 | 1 Laporan | 8.500 | 1 Laporan | 8.500 | 1 Laporan | 10.500 | 5 Laporan | 42.456 | DPUTR KAB.PATI |
| | | | 06 | 05 | Penyusunan rencana kerja SKPD | Jumlah dokumen rencana kerja (RENJA) PD dan laporan evaluasi triwulan yang disusun selama setahun | 2 dok | 2 dok | 17.500 | 2 dok | 21.500 | 2 dok | 23.500 | 2 dok | 24.500 | 2 dok | 25.500 | 10 Dok | 112.500 | DPUTR KAB.PATI |
| | | | 06 | 06 | Penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD | Jumlah dokumen rencana kerja anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD yang disusun selama setahun | 2 dok | 2 dok | 18.305 | 2 dok | 22.500 | 2 dok | 22.500 | 2 dok | 22.500 | 2 dok | 24.500 | 10 Dok | 110.305 | DPUTR KAB.PATI |
| | | | 06 | 07 | Penyusunan laporan perkembangan kegiatan SKPD | Jumlah laporan perkembangan kegiatan SKPD yang disusun selama setahun | 12 Lap | 12 Lap | 14.500 | 12 Lap | 19.500 | 12 Lap | 20.500 | 12 Lap | 20.500 | 12 Lap | 20.500 | 60 Lap | 95.500 | DPUTR KAB.PATI |
| | | | 06 | 10 | Penyusunan rencana strategik SKPD (Renstra PD) | Jumlah Dokumen Rencana Strategik PD (Renstra PD) yang tersusun dalam setahun | 1 dok | 1 dok | 8.500 | - | - | 14.500 | - | - | 1 dok | 16.000 | 1 dok | 39.000 | DPUTR KAB.PATI | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Perubahan Rencana Strategik PD (Renstra PD) Tersusun dalam Setahun | | | | | 1 Dok | | | | | | | | | |
| | | | 06 | 13 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembangunan infrastruktur | Jumlah Laporan kegiatan pembangunan selama setahun | 932 Lap. | 1050 Lap. | 121.688 | 1050 Lap. | 1.430.595 | 1050 Lap. | 1.532.734 | 1050 Lap. | 1.772.094 | 1050 Lap. | 1.827.954 | 5.250 Lap. | 6.685.065 | DPUTR KAB.PATI |

| | | | | | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung-jawab | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|--|---|--------------------------------------|--|------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|-----------------------------------|--|----------------|
| | | | | | | | | Tahun-1 2018 | | Tahun-2 2019 | | Tahun-3 2020 | | Tahun-4 2021 | | Tahun-5 2022 | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | |
| | | | | | | | | Target (5) | Rp. (6) | Target (7) | Rp. (8) | Target (9) | Rp. (10) | Target (11) | Rp. (12) | Target (13) | Rp. (14) | | Target (15) | Rp. (16) |
| (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | | | | | |
| 03 | 01 | 1 | 03 | 07 | Program Peningkatan Jalan Dan Jembatan | Persentase panjang Jalan lokal primer (Kabupaten) yang ditingkatkan | 14,22% | 15,58% | 10.556.469 | 17,44% | 102.174.918 | 19,74% | 111.537.477 | 22,73% | 122.249.214 | 26,79% | 135.547.063 | 26,79% | 482.065.141 | DPUTR KAB.PATI |
| | | | | | | Persentase panjang Jalan lokal sekunder (Poros Desa) yang ditingkatkan | 9,60% | 11,66% | | 12,60% | | 13,76% | | 14,84% | | 15,86% | | 15,86% | | 0 |
| | 1 | 03 | 07 | 01 | Peningkatan jaan ruas A sampai Z | Panjang Jalan yang di tingkatkan | 42 Km | 42 Km | 10.556.469 | 42 Km | 102.174.918 | 42 Km | 111.537.477 | 42 Km | 122.249.214 | 42 Km | 135.547.063 | 210 Km | 482.065.141 | DPUTR KAB.PATI |
| 03 | 01 | 1 | 03 | 15 | Program Pembangunan Jalan dan Jembatan | Persentase panjang jalan baru | 0 | 0 | 1.518.721 | 0 | 11.000.000 | 100 | 12.201.745 | 0 | 13.373.565 | 0 | 15.463.402 | 100 | 53.557.433 | DPUTR KAB.PATI |
| | | | | | | Persentase jembatan rusak yang dibangun kembali | 4,40% | 7,95% | | 11,76% | | 15,85% | | 21,79% | | 28,00% | | 28,00% | | |
| | 1 | 03 | 15 | 03 | Pembangunan Jalan di Kab. Pati | Panjang Jalan Baru | - | - | - | - | - | 2,5 Km | 10.000.000 | 2,5 Km | 10.000.000 | 2 Km | 5.000.000 | 7 Km | 25.000.000 | DPUTR KAB.PATI |
| | 1 | 03 | 15 | 05 | Pembangunan jembatan di wilayah Kabupaten | Jumlah Jembatan rusak yang tertangani | 5 unit | 4 Unit | 1.518.721 | 4 Unit | 11.000.000 | 4 Unit | 2.201.745 | 6 Unit | 3.373.565 | 6 Unit | 10.463.402 | 26 Unit | 28.557.433 | DPUTR KAB.PATI |
| 03 | 01 | 1 | 03 | 16 | Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong - Gorong | Persentase Drainase/ gorong-gorong pada ruas jalan Kabupaten dalam kondisi baik | 75% | 76,00% | 800.000 | 77% | 27.500.000 | 78% | 30.504.360 | 79% | 32.683.911 | 80% | 36.239.153 | 80% | 127.727.424 | DPUTR KAB.PATI |
| | 1 | 03 | 16 | 03 | Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong | Panjang Drainase yang terbangun | 3500 m' | 643 m' | 799.988 | 3400 m' | 27.500.000 | 4000 m' | 30.504.360 | 6000 m' | 32.683.911 | 8000 m' | 36.239.153 | 22.043 m' | 127.727.412 | DPUTR KAB.PATI |
| 03 | 01 | 1 | 03 | 17 | Program Pembangunan Turap/Talud /Bronjong | Persentase Terbangunnya Turap/Talud/ Bronjong | 0,38 | 0,54 | 4.850.000 | 0,93 | 30.000.000 | 1,35 | 32.277.485 | 1,80 | 35.377.322 | 2,30 | 39.225.545 | 2,30 | 141.730.352 | DPUTR KAB.PATI |
| | 1 | 03 | 17 | 01 | Perencanaan turap/talud/bronjong | Dokumen Perencanaan pembangunan Turap/talud/bronjong | - | 1 dok | 20.000 | 1 dok | 200.000 | 5 dok | 820.000 | DPUTR KAB.PATI |
| | 1 | 03 | 17 | 03 | Pembangunan turap/talud/bronjong | Panjang turap/talud/bronjong yang terbangun | 5.454 m' | 6.000 m' | 4.801.166 | 6.500 m' | 29.600.000 | 7.000 m' | 31.877.485 | 7.500 m' | 34.977.322 | 8.000 m' | 38.825.545 | 35.000 m' | 140.081.518 | DPUTR KAB.PATI |
| | 1 | 03 | 17 | 04 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan | Jumlah Pelaporan kegiatan Pembangunan Turap/talud.bronjong selama setahun | 222 Lap. | 250 Lap. | 28.834 | 270 Lap. | 200.000 | 300 Lap. | 200.000 | 300 Lap. | 200.000 | 300 Lap, | 200.000 | 1.420 Lap. | 828.834 | DPUTR KAB.PATI |

| | | | | | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung-jawab | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|--|---|--------------------------------------|--|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|-----------------------------------|--|-----------------------|
| | | | | | | | | Tahun-1 2018 | | Tahun-2 2019 | | Tahun-3 2020 | | Tahun-4 2021 | | Tahun-5 2022 | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | |
| | | | | | | | | Target (5) | Rp. (6) | Target (7) | Rp. (8) | Target (9) | Rp. (10) | Target (11) | Rp. (12) | Target (13) | Rp. (14) | | Target (15) | Rp. (16) |
| (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | | | | | |
| 03 | 01 | 1 | 03 | 18 | Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan | Prosentase Terpeliharanya rutin jalan dan jembatan | 1,85 | 2,73 | 11.606.500 | 3,07 | 15.000.000 | 3,62 | 16.500.000 | 3,89 | 18.707.500 | 4,09 | 21.513.625 | 17,40 | 83.327.625 | DPUTR KAB.PATI |
| | 1 | 03 | 18 | 03 | Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan | Panjang jalan yang dipelihara selama setahun | 30 Km | 40 Km | 10.456.516 | 45 Km | 12.000.000 | 53 Km | 13.000.000 | 57 Km | 14.500.000 | 60 Km | 16.500.000 | 255 Km | 66.456.516 | DPUTR KAB.PATI |
| | 1 | 03 | 18 | 04 | Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan | Jumlah jembatan yang dipelihara selama setahun | 7 Unit | 8 Unit | 1.149.984 | 8 Unit | 3.000.000 | 8 Unit | 3.500.000 | 8 Unit | 4.207.500 | 8 Unit | 5.013.625 | 40 Unit | 16.871.109 | DPUTR KAB.PATI |
| 03 | 01 | 1 | 03 | 19 | Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Talud/ Bronjong | Persentase terpeliharannya Talud, bronjong | 0,161 | 0,161 | 720.000 | 0,161 | 2.500.000 | 0,162 | 2.875.000 | 0,162 | 3.306.250 | 0,162 | 3.802.188 | 0,808 | 13.203.438 | DPUTR KAB.PATI |
| | 1 | 03 | 19 | 01 | Perencanaan rehabilitasi turap/ talud/ bronjong | Dokumen perencanaan rehabilitasi Pemeliharaan turap/ talu/ bronjong | - | 1 Dok | 10.000 | 1 Dok | 30.000 | 1 Dok | 50.000 | 1 Dok | 50.000 | 1 Dok | 50.000 | 5 Dok | 190.000 | DPUTR KAB.PATI |
| | 1 | 03 | 19 | 03 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan | pelaporan hasil movev kegiatan pemeliharaan Turap/ talud/ bronjong | - | 89 Lap. | 14.973 | 97 Lap. | 20.000 | 105 Lap. | 30.000 | 116 Lap. | 30.000 | 125 Lap. | 30.000 | 532 Lap. | 124.973 | DPUTR KAB.PATI |
| | 1 | 03 | 19 | 04 | Rehabilitasi/ Pemeliharaan turap/ talud/ bronjong | Panjang Turap/ Talud/ Bronjong yang dipelihara | 563 m' | 700 m' | 695.028 | 800 m' | 2.450.000 | 900 m' | 2.795.000 | 1000 m' | 3.226.250 | 1100 m' | 3.722.188 | 4500 m' | 12.888.466 | DPUTR KAB.PATI |
| 03 | 01 | 1 | 03 | 22 | Program Pembangunan Sistem Informasi / Data Base Jalan dan Jembatan | Persentase keterisian jenis data dalam sistem database jalan dan jembatan | - | - | - | 37,5 | 600.000 | 75 | 600.000 | 75 | 200.000 | 100 | 200.000 | 100 | 1.600.000 | DPUTR KAB.PATI |
| | 1 | 03 | 22 | 01 | Penyusunan sistem informasi/ data base jalan | Dokumen sistem informasi / data base jalan | - | - | - | 1 dok | 400.000 | 1 dok | 400.000 | | | | | 2dok | 800.000 | DPUTR KAB.PATI |
| | 1 | 03 | 22 | 02 | Penyusunan sistem informasi/ data base Jembatan | Dokumen sistem informasi / data base jembatan | - | - | - | 1 dok | 200.000 | 4 dok | 800.000 | DPUTR KAB.PATI |
| | 1 | 03 | 22 | 04 | Penyusunan sistem informasi/ data base Jar. Irigasi | Dokumen sistem informasi / data base Jar. Irigasi | - | 4 dok | 200.000 | | | | | | | | | 4 dok | 200.000 | DPUTR KAB.PATI |
| 03 | 01 | 1 | 03 | 23 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan | Prosentase Terpeliharanya sarana dan Prasarana Kebinamargaan | 61 | 62 | 5.233.833 | 63 | 32.400.000 | 64,00 | 35.533.114 | 64,00 | 35.201.026 | 65,00 | 39.353.512 | 65 | 147.721.485 | DPUTR KAB.PATI |
| | | | | | | Persentase Daerah yang terlayani PJU | 44,8 | 48 | | 50,80 | | 53,80 | | 56,80 | | 60,80 | | 60,80 | | |
| | 1 | 03 | 23 | 06 | Pengadaan Alat - alat ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan | Jumlah alat - alat ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan yang diadakan selama setahun | 0 | 0 | - | 4 unit | 800.000 | 1 unit | 200.000 | 1 unit | 200.000 | 1 unit | 200.000 | 7 unit | 1.400.000 | DPUTR KAB.PATI |
| | 1 | 03 | 23 | 10 | Rehabilitasi/ pemeliharaan alat-alat berat | jumlah alat-alat berat yang dipelihara selama setahun | 50 Unit | 50 Unit | 3.653.884 | 50 Unit | 2.800.000 | 50 Unit | 3.375.000 | 50 Unit | 3.746.007 | 50 Unit | 4.772.908 | 50 Unit | 18.347.799 | DPUTR KAB.PATI |

| | | | | | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung-jawab | | |
|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|---|--|--------------------------------------|--|------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------------|--|-----------------------|
| | | | | | | | | Tahun-1 2018 | | Tahun-2 2019 | | Tahun-3 2020 | | Tahun-4 2021 | | Tahun-5 2022 | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | |
| | | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | Target | Rp. |
| | | | | | | | | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | | (15) | (16) |
| | 1 | 03 | 23 | 11 | Rehabilitasi/ pemeliharaan peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat berat | jumlah peralatan dan perlengkapan bengkel alat berat yang di pelihara selama setahun | 26 Unit | 26 Unit | 479.968 | 26 Unit | 500.000 | 26 Unit | 600.000 | 26 Unit | 600.000 | 26 Unit | 2.779.968 | DPUTR KAB.PATI | | |
| | 1 | 03 | 23 | 14 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum | Jumlah sarana dan Prasarana Umum yang terpelihara selama setahun | 3 Unit | 2 unit | 1.099.981 | | | | | | | 2 unit | 1.099.981 | DPUTR KAB.PATI | | |
| | 1 | 03 | 23 | 15 | Pembangunan Talud Jalan | Panjang Talud pada ruas jalan kab. Yang terbangun | 0% | 0% | - | 5 Km | 2.800.000 | 5 Km | 3.400.000 | 5 Km | 9.400.000 | 5 Km | 10.400.000 | 25 Km | 26.000.000 | DPUTR KAB.PATI |
| | 1 | 03 | 23 | 16 | Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jar. Listrik dan Penerangan Jalan | Jumlah Jar. Listrik dan Penerangan Jalan yang terpasang | - | - | - | 3400 Titik Lampu | 6.500.000 | 3400 Titik Lampu | 6.958.114 | 3600 Titik Lampu | 8.355.019 | 3600 Titik Lampu | 8.330.604 | 17.000 Titik Lampu | 30.143.737 | DPUTR KAB.PATI |
| | 1 | 03 | 23 | 17 | Jasa Pembayaran Penerangan Jalan Umum (PJU) | Jumlah Rek. Penerangan Jalan umum yang terbayar | - | - | - | 500 rek | 19.000.000 | 500 rek | 21.000.000 | 500 rek | 27.000.000 | 500 rek | 29.000.000 | 2000 rek | 96.000.000 | DPUTR KAB.PATI |
| 03 | 01 | 1 | 03 | 24 | Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan pengairan lainnya | Persentase jaringan irigasi rusak yang tertangani | 10 | 12 | 4.816.339 | 15 | 41.000.000 | 18 | 43.458.114 | 20 | 45.855.019 | 23 | 48.830.604 | 23 | 183.960.076 | DPUTR KAB.PATI |
| | | | | | | Persentase sungai yang dinormalisasi | 17 | 25 | | 30 | | 35 | | 40 | | 45 | | 45 | | |
| | 1 | 03 | 24 | 01 | Perencanaan Pembangunan jaringan irigasi | Dokumen perencanaan Pemb. Jar. Irigasi dengan baik | 3 Dok | 3 Dok | 15.000 | 3 Dok | 353.687 | 3 Dok | 353.687 | 3 Dok | 353.072 | 3 Dok | 353.687 | 15 Dok | 1.429.133 | DPUTR KAB.PATI |
| | 1 | 03 | 24 | 05 | Perencanaan Normalisasi saluran sungai | Dokumen Perencanaan Normalisasi Saluran Sungai | 1 Dok | 3 Dok | 30.000 | 3 Dok | 100.000 | 3 Dok | 180.000 | 3 Dok | 190.000 | 3 Dok | 220.000 | 15 Dok | 720.000 | DPUTR KAB.PATI |
| | 1 | 03 | 24 | 08 | Pembangunan Pintu Air | Jumlah pintu air yang terpasang selama setahun | - | - | - | 5 unit | 250.000 | 5 unit | 450.000 | 5 unit | 250.000 | 5 unit | 450.000 | 20 unit | 1.400.000 | DPUTR KAB.PATI |
| | 1 | 03 | 24 | 09 | Pelaksanaan Normalisasi saluran sungai | Panjang sungai yang di normalisasi | 25.000 m' | 14.000 m' | 1.250.000 | 30.000 m' | 4.100.000 | 34.000 m' | 4.100.000 | 34.000 m' | 4.800.000 | 30.000 m' | 5.040.846 | 142.000 m' | 19.290.846 | DPUTR KAB.PATI |
| | 1 | 03 | 24 | 10 | Rehabilitasi/ pemeliharaan jaringan irigasi | jumlah D.I yang di rehabilitasi/ pelihara semala setahun | 40 D.I | 50 D.I | 2.596.232 | 55 D.I | 7.150.000 | 58 D.I | 7.597.722 | 60 D.I | 7.615.634 | 70 D.I | 8.910.583 | 293 D.I | 33.870.171 | DPUTR KAB.PATI |
| | 1 | 03 | 24 | 13 | Rehabilitasi/ pemeliharaan pintu air | jumlah pintu air yang di pelihara selama setahun | 7.640 unit | 7.640 unit | 228.589 | 7.640 unit | 250.000 | 7.640 unit | 350.000 | 7.640 unit | 550.000 | 7.640 unit | 550.000 | 38.200 Unit | 1.928.589 | DPUTR KAB.PATI |
| | 1 | 03 | 24 | 16 | Pemberdayaan Petani Pemakai Air | Jumlah Partisipasi Kelompok P3A | - | 8 P3A | 200.000 | 10 P3A | 1.500.000 | 12 P3A | 1.500.000 | 14 P3A | 1.500.000 | 16 P3A | 1.500.000 | 60 P3A | 6.200.000 | DPUTR KAB.PATI |

| | | | | | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung-jawab | | |
|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|---|--|--------------------------------------|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|--|-----------------------|
| | | | | | | | | Tahun-1 2018 | | Tahun-2 2019 | | Tahun-3 2020 | | Tahun-4 2021 | | Tahun-5 2022 | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | |
| | | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | Target | Rp. |
| | | | | | | | | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | | (15) | (16) |
| | | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | 1 | 03 | 24 | 17 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan | Jumlah Pelaporan kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan pengairan | - | 108 Lap | 46.518 | 120 Lap | 150.000 | 150 Lap | 280.392 | 180 Lap. | 450.000 | 180 Lap. | 450.000 | 738 Lap | 1.376.910 | DPUTR KAB.PATI |
| | 1 | 03 | 24 | 21 | Pembinaan dan pengawasan pemakaian sempadan sungai/irigasi | Jumlah Patok Batas dan Papan Nama yang terpasang | 500 Unit | 500 Unit | 450.000 | 600 Unit | 500.000 | 600 Unit | 500.000 | 600 Unit | 500.000 | 600 Unit | 732.484 | 2900 Unit | 2.682.484 | DPUTR KAB.PATI |
| | 1 | 03 | 24 | 24 | Peningkatan Jaringan Irigasi | Panjang Jaringan irigasi yang di tingkatkan | - | - | 7.500 m' | 18.000.000 | 8.000 m' | 19.500.000 | 8.600 m' | 21.000.000 | 9.000 m' | 22.000.000 | 33.100 m' | 115.061.943 | DPUTR KAB.PATI | |
| | 1 | 03 | 24 | 26 | Pelaksanaan Program IPDMIP | Terlaksananya Program IPDMIP | - | 0% | - | 13 D.I | 8.646.313 | 13 D.I | 8.646.313 | 13 D.I | 8.646.313 | 13 D.I | 8.623.004 | 13 D.I | 34.561.943 | DPUTR KAB.PATI |
| 03 | 01 | 1 | 03 | 25 | Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku | Persentase Tersedianya air Baku | - | 0,53 | 700.000 | 1,16 | 1.500.000 | 1,29 | 1.663.874 | 1,37 | 1.823.668 | 1,48 | 2.022.040 | 5,83 | 7.709.582 | DPUTR KAB.PATI |
| | 1 | 03 | 25 | 04 | Pembangunan sumur-sumur air tanah | Terbangunya Sumur - Sumur Air Tanah untuk pertanian | - | 25.920.000 liter | 700.000 | 51.840.000 liter | 500.000 | 51.840.000 liter | 663.874 | 51.840.000 liter | 823.668 | 51.840.000 liter | 7.022.040 | 233.280.000 liter | 9.709.582 | DPUTR KAB.PATI |
| | 1 | 03 | 25 | 10 | Pembangunan Sarana dan prasarana Penampung Air Permukaan | jumlah Sarana dan Praasarana Penampung air Permukaan yang terbangun selama setahun | - | - | - | 3 unit | 1.000.000 | 3 unit | 1.000.000 | 3 unit | 1.000.000 | 5 unit | 1.500.000 | 14 unit | 4.500.000 | DPUTR KAB.PATI |
| 03 | 01 | 1 | 03 | 27 | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah | Prosentas Kinerja Pengolahan Air Minum dan air Limbah | 74,8 | 75,27 | 325.000 | 76,02 | 2.500.000 | 76,72 | 2.773.124 | 77,39 | 3.099.447 | 78,03 | 3.370.068 | 78,03 | 12.067.639 | DPUTR KAB.PATI |
| | 1 | 03 | 27 | 01 | Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah | Jumlah Air yang di hasilkan | 1.192.600 liter | 1.192.600 liter | 75.000 | 1.192.600 liter | 2.250.000 | 1.192.600 liter | 2.523.124 | 1.192.600 liter | 2.849.447 | 1.192.600 liter | 3.120.068 | 5.963.000 Ltr | 10.817.639 | DPUTR KAB.PATI |
| | 1 | 03 | 27 | 02 | Penyediaan prasarana dan sarana air limbah | Persentase rumah tangga yang terlayani sanitasi | 93,16% | 94,66% | 100.000 | 96,01% | 100.000 | 97,51% | 100.000 | 99,01% | 100.000 | 100% | 100.000 | 100% | 500.000 | DPUTR KAB.PATI |
| | 1 | 03 | 27 | 09 | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | Pelaporan kegiatan pengelolaan air minum dan air limbah | 25 Lap | 30 Lap. | 150.000 | 30 Lap. | 150.000 | 30 Lap | 150.000 | 30 Lap | 150.000 | 30 Lap | 150.000 | 120 Lap | 750.000 | DPUTR KAB.PATI |
| 03 | 01 | 1 | 01 | 29 | program Pengembangan Wilayah Strategis Cepat Tumbuh | Prosentase Daerah yang tertangani PJU | 44,8 | 47,8 | 22.573.770 | - | 47,8 | 22.573.770 | DPUTR KAB.PATI | |
| | 1 | 03 | 29 | 05 | Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jar. Listrik dan Penerangan Jalan | Jumlah Jar. Listrik dan Penerangan Jalan yang terpasang | 3000 Titik Lampu | 3200 Titik Lampu | 3.573.770 | - | - | - | - | - | - | - | 3200 Titik Lampu | 3.573.770 | DPUTR KAB.PATI | |
| | 1 | 03 | 29 | 06 | Jasa Pembayaran Penerangan Jalan Umum (PJU) | Jumlah Rek. Penerangan Jalan umum yang terbayar | 500 rek | 500 rek | 19.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | 500 rek | 19.000.000 | DPUTR KAB.PATI | |

| | | | | | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung-jawab | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|--|---|--------------------------------------|--|-----------|--------------|---------|--------------|-----------|--------------|-----------|----------------|-----------|-----------------------------------|--|----------------|
| | | | | | | | | Tahun-1 2018 | | Tahun-2 2019 | | Tahun-3 2020 | | Tahun-4 2021 | | Tahun-5 2022 | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | |
| | | | | | | | | Target (5) | Rp. (6) | Target (7) | Rp. (8) | Target (9) | Rp. (10) | Target (11) | Rp. (12) | Target (13) | Rp. (14) | | Target (15) | Rp. (16) |
| (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | | | | | |
| 03 | 01 | 1 | 3 | 30 | Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan | Prosentase Terbangunya infrastruktur Pedesaan | 90% | 92% | 1.019.669 | - | - | - | - | 92% | 1.019.669 | DPUTR KAB.PATI | | | | |
| | 1 | 03 | 30 | 8 | Moitoring, evaluasi dan pelaporan | Jumlah pelaporan kegiatan bantuan keuangan di desa | 936 lap | 1.100,00 | 1.019.669 | | | | | 1.100,00 | 1.019.669 | DPUTR KAB.PATI | | | | |
| 03 | 01 | 1 | 3 | 31 | Program Perencanaan Tata Ruang | Prosentase jumlah perda tata ruang | 100% | 100% | 610.000 | 100% | 750.000 | 100% | 1.000.000 | 100% | 1.100.000 | 100% | 4.660.000 | DPUTR KAB.PATI | | |
| | 1 | 03 | 31 | 03 | Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang | jumlah peserta sosialisasi perundang-undangan tentang rencana tata ruang selama setahun | - | 63 Peserta | 25.000 | 63 Peserta | 30.000 | 63 Peserta | 50.000 | 63 Peserta | 150.000 | 63 Peserta | 200.000 | 315 peserta | 455.000 | DPUTR KAB.PATI |
| | 1 | 03 | 31 | 05 | Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan | Dokumen Detail Tata ruang Kawasan | - | - | - | 1 Dok | 150.000 | 1 Dok | 200.000 | 1 Dok | - | - | - | 3 Dok | 350.000 | DPUTR KAB.PATI |
| | 1 | 03 | 31 | 08 | Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang RTRW | Jumlah perda tentang RTRW yang disahkan. | 1 Raperda | 1 perda | 140.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 perda | 140.000 | DPUTR KAB.PATI |
| | 1 | 03 | 31 | 10 | Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang | jumlah rakor yang dilaksanakan selama setahun | - | 16 Rakor | 130.000 | 16 Rakor | 150.000 | 16 Rakor | 200.000 | 16 Rakor | 200.000 | 16 Rakor | 200.000 | 80 Rakor | 880.000 | DPUTR KAB.PATI |
| | 1 | 03 | 31 | 12 | Pelatihan aparat dalam perencanaan tata ruang | jumlah peserta pelatihan perencanaan tata ruang | - | 26 Peserta | 25.000 | 26 Peserta | 50.000 | 26 Peserta | 100.000 | 26 Peserta | 200.000 | 26 Peserta | 200.000 | 130 Peserta | 575.000 | DPUTR KAB.PATI |
| | 1 | 03 | 31 | 13 | Survey dan Pemetaan | jumlah peta hasil survey selama setahun | - | 24 Peta | 290.000 | 24 Peta | 370.000 | 24 Peta | 450.000 | 25 Peta | 550.000 | 25 Peta | 600.000 | 122 Peta | 2.260.000 | DPUTR KAB.PATI |
| 03 | 01 | 1 | 3 | 32 | Program Pemanfaatan Ruang | persentase Ketepatan Ruang sesuai dengan Fungsinya | 59,26% | 64,29% | 170.000 | 69,29% | 183.600 | 74,29% | 215.000 | 74,29% | 250.000 | 77,29% | 300.000 | 77,29% | 1.118.600 | DPUTR KAB.PATI |
| | 1 | 03 | 32 | 07 | Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang | jumlah peserta sosialisasi Kebijakan Norma, Standar, Prosedur, dan manual pemanfaatan ruang | 80 Peserta | 85 Peserta | 30.000 | 90 Peserta | 40.000 | 95 Peserta | 50.000 | 100 Peserta | 70.000 | 105 Peserta | 100.000 | 475 Peserta | 290.000 | DPUTR KAB.PATI |
| | 1 | 03 | 32 | 08 | Koordinasi dan fasilitasi penyusunan pemanfaatan ruang lintas Kabupaten/Kota | jumlah rakor yang dilakukan selama setahun | 24 Rakor | 24 Rakor | 140.000 | 24 Rakor | 143.600 | 24 Rakor | 165.000 | 24 Rakor | 180.000 | 24 Rakor | 200.000 | 120 Rakor | 828.600 | DPUTR KAB.PATI |
| 03 | 01 | 1 | 3 | 33 | Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang | prosentase Pengendalian pemanfaatan fasilitas umum di Kab. Pati | 100% | 100% | 20.000 | 100% | 150.378 | 100% | 30.000 | 100% | 35.000 | 100% | 40.000 | 100% | 275.378 | DPUTR KAB.PATI |
| | 1 | 03 | 33 | 06 | Koordinasi dan fasilitasi pengendalian pemanfaatan ruang lintas Kabupaten/Kota | prosentase pengendalian pemanfaatan ruang lintas kab/Kota | 76% | 79% | 20.000 | 84% | 150.378 | 89% | 30.000 | 91% | 35.000 | 91% | 40.000 | 91% | 275.378 | DPUTR KAB.PATI |

| | | | | | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung-jawab | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|--|---|--------------------------------------|--|-----------|-----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|-----------------|------------|-----------------------------------|--|----------------|
| | | | | | | | | Tahun-1 2018 | | Tahun-2 2019 | | Tahun-3 2020 | | Tahun-4 2021 | | Tahun-5 2022 | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | |
| | | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | Target | Rp. |
| | | | | | | | | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | | (15) | (16) |
| (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | | | | | |
| 03 | 01 | 1 | 03 | 36 | Program Pengaturan Jasa Kontruksi | Prosentase Rekomendasi Baru | 12% | 15% | 159.500 | 18% | 200.000 | 21% | 250.000 | 24% | 270.000 | 27% | 300.000 | 27% | 1.179.500 | DPUTR KAB.PATI |
| | 1 | 03 | 36 | 01 | Pengaturan dan penyelenggaraan ijin jasa usaha konstruksi | jumlah rekom yang diberikan kepada Pelaku jasa konstruksi | 140 rekom | 146 rekom | 59.500 | 150 rekom | 100.000 | 154 rekom | 150.000 | 160 Rekom | 170.000 | 165 Rekom | 200.000 | 915 Rekom | 679.500 | DPUTR KAB.PATI |
| | | | 36 | 2 | Sosialisasi dan diseminasi peraturan perundang-undangan jasa konstruksi dan peraturan lainnya yang terkait | Jumlah peserta sosialisasi dan diseminasi peraturan perundang-undangan jasa konstruksi dan peraturan lainnya yang terkait | peserta | 30 | 10.000 | | | | | | | | 30 | 10.000 | DPUTR KAB.PATI | |
| | 1 | 03 | 36 | 04 | Pembinaan Tenaga Terampil Bidang Konstruksi | Tenaga terampil yang brsertifikat (orang) | 0 | 40 peserta | 100.000 | 80 peserta | 100.000 | 80 peserta | 100.000 | 80 peserta | 100.000 | 80 peserta | 100.000 | 360 peserta | 500.000 | DPUTR KAB.PATI |
| 03 | 01 | 1 | 03 | 37 | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan | Persentase sampah perkotaan yang tertangani | 34,0 | 36,0 | 8.843.810 | 39,0 | 15.000.000 | 41,0 | 20.000.000 | 44,0 | 24.000.000 | 46,0 | 25.000.000 | 46,0 | 92.843.810 | DPUTR KAB.PATI |
| | 1 | 03 | 37 | 01 | Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan | volume sampah yang tertangani | 116.800 m3/ tahun | 129.575 m3/ thn | 8.843.810 | 142.350 m3/ thn | 15.000.000 | 155.125 m3/Thn | 20.000.000 | 167.900 m3/thn | 24.000.000 | 180.675 m3/hari | 25.000.000 | 180.675 m3/hari | 92.843.810 | DPUTR KAB.PATI |
| 03 | 01 | 1 | 03 | 38 | Program Pembangunan Ruang Terbuka Publik Perkotaan | Persentase ruang terbuka publik di perkotaan | 3,35% | 11,24% | 5.235.484 | 14,59% | 9.000.000 | 17,88% | 10.800.000 | 21,19% | 11.664.000 | 24,4 % | 12.597.120 | 24,4 % | 49.296.604 | DPUTR KAB.PATI |
| | 1 | 03 | 38 | 01 | Pemeliharaan sarana dan prasarana pertamanan | luas taman yang di pelihara / terbangun | 2.098 m2 | 7.040 m2 | 5.235.484 | 9.138 m2 | 9.000.000 | 11.199 m2 | 10.800.000 | 13.272 m2 | 11.664.000 | 15.282 m2 | 12.597.120 | 15.282 m2 | 49.296.604 | DPUTR KAB.PATI |
| 03 | 01 | 1 | 03 | 40 | Program Penataan Bangunan dan Pembangunan Gedung | Prosentase Pembangunan Gedung Pemerintahan | - | - | - | 6,0% | 26.000.000 | 6,0% | 29.989.000 | 6,0% | 34.000.000 | 6,0% | 37.000.000 | 24% | 126.989.000 | DPUTR KAB.PATI |
| | 1 | 03 | 40 | 01 | Pembangunan Gedung Kantor | Jumlah unit gedung kantor yang dibangun selama setahun. | - | - | - | 5 Unit | 24.000.000 | 5 Unit | 28.989.000 | 5 unit | 33.000.000 | 5 unit | 36.000.000 | 20 unit | 121.989.000 | DPUTR KAB.PATI |
| | 1 | 03 | 40 | 02 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum | Jumlah sarana dan prasarana umum yang dipelihara selama setahun | | | | 2 unit | 2.000.000 | 2 unit | 1.000.000 | 2 unit | 1.000.000 | 2 unit | 1.000.000 | 10 unit | 5.000.000 | DPUTR KAB.PATI |
| | 1 | 03 | 01 | 39 | Prgram pembangunan Sarpras air Bersih pedesaan/ PAMSIMAS | Persentase air bersih bagi masyarakat | 70% | 72% | 1.869.000 | 74 | 2.000.000 | 75 | 2.000.000 | 77 | 2.000.000 | 78 | 2.000.000 | 78 | 9.869.000 | DPUTR KAB.PATI |
| | | | | | Bukan Pelayanan Dasar | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Pertanahan | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung-jawab | | | |
|--------------|----|---|----|----|--|--|---|--|--------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|-----------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| | | | | | | | | Tahun-1 2018 | | Tahun-2 2019 | | Tahun-3 2020 | | Tahun-4 2021 | | Tahun-5 2022 | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | |
| | | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | Target | Rp. | |
| | | | | | | | | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | | (15) | (16) | |
| 03 | 01 | 2 | 04 | 16 | Program Penataan Penguasaan Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah | prosentase tertatanya Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah | 100% | 100% | 403.000 | 100% | 500.000 | 100% | 540.000 | 100% | 583.200 | 100% | 629.856 | 100% | 2.656.056 | DPUTR KAB.PATI | |
| | | 2 | 04 | 16 | 01 | Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah | dokumen penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah | 1 dok | 1 dok | 36.000 | 1 dok | 40.000 | 1 dok | 60.000 | 1 dok | 83.200 | 1 dok | 90.000 | 5 dok | 309.200 | DPUTR KAB.PATI |
| | | 2 | 04 | 16 | 02 | Penyuluhan hukum pertanahan | jumlah peserta penyuluhan huku pertanahan | 460 Orang | 460 Orang | 71.000 | 460 Orang | 100.000 | 460 Orang | 100.000 | 460 Orang | 110.000 | 460 Orang | 139.856 | 2300 Orang | 520.856 | DPUTR KAB.PATI |
| | | 2 | 04 | 16 | 03 | Penyusunan buku manajemen pertanahan | dokumen manajemen pertanahan | 1 dok | 1 dok | 26.000 | 1 dok | 75.000 | 1 dok | 95.000 | 1 dok | 100.000 | 1 dok | 100.000 | 5 dok | 396.000 | DPUTR KAB.PATI |
| | | 2 | 04 | 16 | 05 | Penetapan dan Penegasan Batas Daerah | dokumen penetapan batas dan penegasan batas daerah | 1 dok | 1 dok | 270.000 | 1 dok | 285.000 | 1 dok | 285.000 | 1 dok | 290.000 | 1 dok | 300.000 | 5 dok | 1.430.000 | DPUTR KAB.PATI |
| 03 | 01 | 2 | 04 | 17 | Program Penyelesaian Konflik Pertanahan | Terselesainya konflik pertanahan yang terselesaikan | 100% | 100% | 53.000 | 100% | 185.000 | 100% | 180.000 | 100% | 194.400 | 100% | 210.000 | 100% | 822.400 | DPUTR KAB.PATI | |
| | | 2 | 04 | 17 | 01 | Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan | dokumen fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan | 5 dok | 5 dok | 28.000 | 5 dok | 125.000 | 5 dok | 90.000 | 5 dok | 100.000 | 5 dok | 110.000 | 25 dok | 453.000 | DPUTR KAB.PATI |
| | | 2 | 04 | 17 | 02 | Upaya penyelesaian konflik-konflik pertanahan | dokumen upaya penyelesaian konflik-konflik pertanahan | 1 dok | 1 dok | 25.000 | 1 dok | 60.000 | 1 dok | 90.000 | 1 dok | 94.400 | 1 dok | 100.000 | 5 dok | 369.400 | DPUTR KAB.PATI |
| 03 | 01 | 2 | 03 | 18 | Program Sistem Informasi Pertanahan | prosentase informasi Pertanahan yang baik | 100% | 100% | 255.000 | 100% | 300.000 | 100% | 324.000 | 100% | 349.920 | 100% | 377.914 | 100% | 1.606.834 | DPUTR KAB.PATI | |
| | | 2 | 04 | 18 | 01 | Penyusunan sistem informasi pertanahan yang handal | dokumen pembuatan sistem informasi pertanahan yang baik | 1 dok | 1 dok | 255.000 | 1 dok | 300.000 | 1 dok | 324.000 | 1 dok | 349.920 | 1 dok | 377.914 | 5 dok | 1.606.834 | DPUTR KAB.PATI |
| | | 2 | 04 | 18 | 06 | Pembakuan Nama Rupa Bumi | Jumlah titik koordinat Rupa Bumi yang bisa di selesaikan dalam setahun | - | - | - | 200 titik koordinat | 300.000 | 800 titik koordinat | 1.200.000 | DPUTR KAB.PATI |
| TOTAL | | | | | | | | | 117.252.794 | | 333.782.410 | | 367.547.755 | | 400.631.384 | | 440.561.295 | | 1.659.775.638 | | |

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan DPUTR Kab.Pati

Kinerja DPUTR Kabupaten Pati dalam kurun waktu tahun 2017-2022 diukur menggunakan berbagai indikator kinerja. Indikator kinerja ini merupakan target - target capaian per tahun yang diharapkan dapat tercapai sebagai bahan evaluasi. Secara rinci target capaian indikator kinerja DPUTR Kabupaten Pati dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 7.1
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DPUTR KABUPATEN PATI
TAHUN 2017-2022

| No. | Misi/Indikator | Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Tahun 2017 | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD |
|-----|--|--|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| | | | Tahun 2018 | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| I. | Misi ke 3 : Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan | | | | | | | |
| A. | Indikator Tujuan: Tersedianya air baku ... sampai tahun 2022 (air bersih dan irigasi) (%) | 80.60 | 81.75 | 83.88 | 85.07 | 86.26 | 88.37 | 88.37 |
| B. | Indikator Sasaran: | | | | | | | |
| 1) | Kapasitas air bersih daerah (m3) | 74.80 % | 75,20 % | 76,02 % | 76,72 % | 77,39 % | 78,03 % | 74.80 % |
| 2) | Luas genangan (ha) | 3,350.84 | 3,290.84 | 3,230.84 | 3,150.84 | 3,070.84 | 2,990.84 | 2,990.84 |
| 3) | Persentase Gedung pemerintahan dalam kondisi baik (%) | 14.29 | 22.62 | 28.57 | 34.52 | 40.48 | 46.43 | 46.43 |
| 4) | Pembinaan jasa konstruksi (%) | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5) | Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik (%) | 80 | 81 | 83 | 84 | 85 | 87 | 87 |
| 6) | Persentase sungai dalam kondisi baik (%) | 40 | 43 | 46 | 50 | 55 | 60 | 60 |
| 7) | Kapasitas air irigasi daerah (m3) | 301,939,200 | 305,713,440 | 313,261,920 | 317,036,160 | 320,810,400 | 328,358,880 | 328,358,880 |

| | | | | | | | | |
|-----|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| C. | Indikator Program: | | | | | | | |
| 1) | Persentase jumlah penduduk yang terlayani air bersih (%) | 74.80 | 75.27 | 76.02 | 76.72 | 77.39 | 78.03 | 78.03 |
| 2) | Persentase Pembangunan Gedung Pemerintahan (%) | 8.3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 3) | Persentase rekomendasi baru (%) | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 27 |
| 4) | Persentase Drainase/gorong-gorong pada ruas jalan Kabupaten dalam kondisi baik (%) | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 80 |
| 5) | Persentase Lahan Pertanian Tadah Hujan yang teraliri air (%) | 0 | 0.528 | 1.162 | 1.268 | 1.374 | 1.480 | 1.480 |
| 6) | Persentase Tanggul sungai Kewenangan Kab.Pati dalam Kondisi Baik (%) | 0.38 | 0.54 | 0.93 | 1.35 | 1.80 | 2.30 | 2.30 |
| 7) | Persentase Talud/bronjong yang tertangani (%) | 0.161 | 0.161 | 0.161 | 0.162 | 0.162 | 0.162 | 0.162 |
| 8) | Persentase jaringan irigasi yang di tangani (%) | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 23 | 23 |
| 9) | Persentase panjang sungai yang di normalisasi (%) | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 45 |
| II. | Misi ke 4 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan mengutamakan pelayanan publik | | | | | | | |
| A. | Indikator Tujuan : Persentase Pemanfaatan Ruang sesuai dengan Peruntukan ruang | 36.14(%) | 41.14(%) | 46.14(%) | 51.14(%) | 56.14(%) | 61.14(%) | 61.14 (%) |
| B. | Indikator Sasaran : | | | | | | | |
| 1) | Ketaatan terhadap RTRW Kabupaten (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2) | Rencana tata ruang yang ditetapkan (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3) | Persentase penanganan permasalahan pertanahan (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| | | | | | | | | |
|------|---|--------|--------|---------|----------|---------|---------|---------|
| C. | Indikator Program : | | | | | | | |
| 1) | Terdapatnya Perda tentang perencanaan tata ruang (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2) | Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang (%) | 59.26 | 64.29 | 69.29 | 74.29 | 74.29 | 77.29 | 77.29 |
| 3) | Tercapainya pengendalian pemanfaatan fasilitas umum di Kabupaten Pati (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4) | Persentase izin lokasi yang sesuai (ijin) | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 72 | 72 |
| 5) | Persentase luas lahan yang bersertifikat (kasus) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 6) | Persentase Penyelesaian Kasus tanah Negara (%) | 50 | 54 | 57 | 60 | 62 | 65 | 65 |
| 7) | Persentase Tercapainya sistem informasi pertanahan yang baik (%) | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 72 | 72 |
| III. | MISI 7 : Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Daerah, Mendukung Pengembangan Ekonomi Daerah | | | | | | | |
| A. | Indikator Tujuan : | | | | | | | |
| 1) | Persentase jalan kondisi baik (%) | 62 | 56 | 68 | 71 | 74 | 77 | 77 |
| 2) | Persentase jembatan kondisi baik (%) | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 80 |
| B. | Indikator Sasaran : | | | | | | | |
| 1) | Panjang jalan kondisi baik (km) | 908.91 | 952.89 | 996.864 | 1040.844 | 1084.82 | 1128.80 | 1128.80 |
| 2) | Jumlah jembatan kondisi baik (unit) | 272 | 275 | 279 | 283 | 287 | 290 | 290 |
| C. | Indikator Program: | | | | | | | |
| 1) | Persentase panjang jalan rusak yang ditingkatkan (%) | 14,21 | 15,57 | 17,44 | 19,73 | 22,72 | 26,78 | 26,78 |
| 2) | Persentase panjang jalan baru (%) | - | - | - | 100 | - | - | - |
| 3) | Persentase jembatan rusak yang tertangani (%) | 8,26 | 8,61 | 8,98 | 9,39 | 9,84 | 10,33 | 10,33 |
| 4) | Persentase Pemeliharaan Rutin jalan (%) | 2,05 | 2,73 | 3,07 | 3,62 | 3,89 | 4,09 | 4,09 |

| | | | | | | | | |
|-----|---|------|------|------|------|------|------|------|
| 5) | Persentase Pemeliharaan jembatan (%) | 1,65 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 |
| 6) | Persentase sistem informasi/ data base jalan yang terbangun (%) | - | - | 50 | 50 | - | - | - |
| 7) | Persentase sistem informasi/ data base jembatan yang terbangun (%) | - | - | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 8) | Persentase terpeliharanya alat berat (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 9) | Persentase terpeliharanya Peralatan dan Perlengkapan Bengkel alat berat (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10) | Persentase talud jalan dalam kondisi baik (%) | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,45 | 0,45 |
| 11) | Persentase daerah yang tertangani PJU (%) | 44,8 | 47,8 | 50,8 | 53,8 | 56,8 | 60,8 | 60,8 |

BAB VIII

P E N U T U P

Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 merupakan dokumen perencanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah yang disusun berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 yang berisikan penjabaran visi dan misi Bupati selama 5 (lima) tahun dalam mewujudkan perencanaan pembangunan Kabupaten Pati. Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pati dalam penyusunannya memperhatikan perkembangan situasi, kondisi dan potensi Kabupaten Pati serta masukan dari aspirasi masyarakat yang dinamis guna mendukung pencapaian tujuan RPJMD.

Dengan didukung SDM yang potensial dan handal, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pati berupaya mewujudkan mekanisme perencanaan secara akuntabel, transparan dan konsisten berlandaskan komitmen yang dibangun dan disepakati. Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di bidang perencanaan dari Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pati Tahun 2012-2017 dan mengartikulasikan visi dan misi Bupati Pati tahun 2017-2022 yang tertuang dalam RPJMD.

Hasil pelaksanaan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 akan menjadi tolok ukur keberhasilan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pati yang disampaikan dalam bentuk Laporan Kinerja, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Pati setiap akhir tahun anggaran dengan menilai aspek efisiensi penggunaan anggaran yang terkait dengan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan.

Penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pati pada hakekatnya untuk keselarasan dan kesinambungan perencanaan program jangka menengah periode lalu dengan periode mendatang dalam rangka mewujudkan visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pati Tahun 2005-2025.

BUPATI PATI,

Ttd.

HARYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



SITI SUBIATI, SH, MM

Pembina

NIP. 19720424 199703 2 010